



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8  
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telp. +62 21 5730301 • 5730316  
Fax +62 21 5733437

ISBN 978-623-91312-4-1



9 786239 131241

# 2020 2024

# Rencana Strategis

DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN EKOSISTEM



2020  
2024

# Rencana Strategis

DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN EKOSISTEM



# 2020 2024

# Rencana Strategis

DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN EKOSISTEM

*Diterbitkan oleh:*

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2020

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8  
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Tlp: +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437  
Email: pa.helpmail@gmail.com; setditjenksdae@menlhk.go.id

## TIM PENYUSUN

<b>Penanggung Jawab</b>	Direktur Jenderal KSDAE
<b>ISBN</b>	978-623-91312-4-1
<b>Pengarah</b>	Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
<b>Ketua</b>	Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
<b>Penyunting</b>	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
<b>Penulis</b>	Roby Rajani Nurzaini, S.Si, MM. Armanita Gumardes, S.Hut. Aryo Ganesworo, S.E. Arindy Pratiwi, S.E.
<b>Desain Grafis</b>	Staf Sub Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
<b>Ilustrasi Cover</b>	Staf Sub Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

ISBN 978-623-91312-4-1





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Nomor: P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019;
  - bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Rencana Strategis Unit Eselon I dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi

## Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
  21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
  22. SK Menteri LHK No. SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.18/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

- (3) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

#### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:
  - a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
  - b. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- (3) Para direktur dan kepala unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem wajib menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan di dalam rencana strategis masing-masing.
- (4) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
- (5) Penanggung Jawab Kegiatan/Eselon II melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas Pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.
- (6) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai

ketersediaan anggaran.

- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 resmi dihapus.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 September 2020  
DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN EKOSISTEM,



**Ir. WIRATNO, M.Sc.**

NIP. 19620328 198903 1 003

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL**  
**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

NOMOR: P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL**  
**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**TAHUN 2020-2024**

vi

Rencana  
Strategis  
2020  
2024

DIREKTORAT  
JENDERAL  
KONSERVASI  
SUMBERDAYA  
ALAM DAN  
EKOSISTEM

# Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran Renstra Kementerian LHK dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 berisi Cascading Sasaran Strategis Kementerian LHK menjadi Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dicapai melalui Indikator Kinerja Program (IKP) dan diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun.

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 ini dapat benar-benar dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 7 September 2020

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,

  
  
**Ir. WIRATNO, M.Sc.**  
NIP. 19620328 198903 1 003

# Daftar Isi

<b>Peraturan Dirjen KSDAE</b>	i
<b>Kata Pengantar</b>	vii
<b>Daftar Isi</b>	viii
<b>Daftar Tabel</b>	ix
<b>Daftar Gambar</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	14
1.1. Kondisi Umum	17
1.2. Potensi dan Permasalahan	33
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024</b>	38
2.1. Visi dan Misi Presiden masa bakti 2020-2024	39
2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen KSDAE	41
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN KSDAE</b>	44
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan KLHK	45
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE	50
3.3. Kerangka Regulasi	54
3.4. Kerangka Kelembagaan	52
3.5. Pengarusutamaan	54
<b>BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	56
4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KSDAE	57
4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	60
<b>BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	66
5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading)	67
5.2. Target Kinerja	68
5.3. Kerangka Pendanaan	72
<b>BAB VI PENUTUP</b>	74

viii

Rencana  
Strategis  
2020  
2024

DIREKTORAT  
JENDERAL  
KONSERVASI  
SUMBERDAYA  
ALAM DAN  
EKOSISTEM

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b>	Kebijakan dan Strategi Kawasan Konservasi pada RKTN 2011-2030	48
<b>Tabel 2.</b>	Sebaran Pegawai Pusat dan UPT berdasarkan Jenis Kelamin	53
<b>Tabel 3.</b>	Sebaran Pegawai per Golongan berdasarkan Jenis Kelamin	53
<b>Tabel 4.</b>	Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE	59
<b>Tabel 5.</b>	Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	59
<b>Tabel 6.</b>	Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen 62	62
<b>Tabel 7.</b>	Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	62
<b>Tabel 8.</b>	Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Kualitas Lingkungan Hidup	64
<b>Tabel 9.</b>	IKP dan Target Kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 sesuai dengan Redesign Sistem Program dan Penganggaran.	68
<b>Tabel 10.</b>	Indikator Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024	69
<b>Tabel 11.</b>	Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024	69
<b>Tabel 12.</b>	Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2020-2024	70
<b>Tabel 13.</b>	Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024	70
<b>Tabel 14.</b>	Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial Tahun 2020-2024	71
<b>Tabel 15.</b>	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024 71	71
<b>Tabel 16.</b>	Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Belanja (dalam jutaan rupiah)	72
<b>Tabel 17.</b>	Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Kegiatan (dalam ribuan rupiah)	73

# Daftar Gambar

<b>Gambar 1.</b>	Struktur Organisasi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	19
<b>Gambar 2.</b>	Analisis SWOT	35
<b>Gambar 3.</b>	Redesign Sistem Program dan Penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58

*foto kiri*  
Bunaken Manado Tua

*foto kanan*  
TN Bantimurung Bulusaraun

X





Macan tutul  
*Panthera pardus*

Dokumentasi:  
Balai TN Meru Betiri (Kamera Trap)  
Lokasi:  
TN Meru Betiri



Pulau Padar

Lokasi:  
Taman Nasional Komodo

Dokumentasi:  
Iskandar

## BAB SATU

# Pendahuluan

## 1.1. KONDISI UMUM

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya, sebagai Kawasan Hutan, sedangkan sisanya sekitar 37% merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Disamping itu, sekitar 5,3 juta hektar dari perairan wilayah Indonesia telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan yang pengelolaannya dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2018).

Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi berbeda yaitu: Hutan

Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Sampai dengan Desember 2017 Kawasan Konservasi seluas 27,4 Juta Hektar yang terdiri dari 22,1 juta hektar daratan dan 5,3 juta hektar perairan. Kawasan Hutan Konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA terdiri dari Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan.

Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang beriklim tropis ini sangat tinggi, Butler pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, dengan 13 tipe ekosistem daratan dan enam tipe ekosistem perairan dan terbagi menjadi 74 tipe vegetasi. Mengacu pada *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015-2020, Indonesia tercatat memiliki 1.605 jenis burung, 723 jenis reptil, 385 jenis amphibi, 720 jenis mamalia, 1.248 jenis ikan air tawar, 197.964 jenis invertebrata 5.137 jenis arthropoda, serta 181.847 jenis serangga. Dalam dunia flora, Indonesia tercatat memiliki 91.251 jenis tumbuhan berspora, 120 jenis gymnospermae, serta sekitar 30.000-40.000 jenis tumbuhan berbunga (Angiospermae), yang dari perkiraan tersebut, hingga saat ini baru teridentifikasi sekitar 19.112 jenis.

Banyak diantara keanekaragaman jenis fauna Indonesia yang sudah sangat dikenal secara global. *Flagship spesies* tersebut antara lain Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*),

Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Orangutan Sumatera (*Pongo pygmaeus*), Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), Anoa (*Bubalus quarlesi* dan *B. depressicornis*), Komodo (*Varanus komodoensis*), serta jenis-jenis burung Cendrawasih (famili *Paradisaeidae*).

Kawasan Konservasi di Indonesia berjumlah 552 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Kawasan konservasi dimaksud meliputi 214 unit cagar alam seluas 4,25 juta hektar, 79 unit suaka margasatwa seluas 16,52 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,52 juta hektar, 131 unit taman wisata alam seluas 830 ribu hektar, 34 unit taman hutan raya seluas 371,12 ribu hektar, 11 unit taman buru seluas 171,25 ribu hektar serta 29 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 306,06 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.

Sebagian besar kawasan konservasi (59,79% dari total 27,4 juta hektar) merupakan kawasan yang difungsikan sebagai taman nasional. Beberapa diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu empat kawasan sebagai situs warisan dunia (*World Heritage Site*), 20 kawasan konservasi sebagai cagar biosfer (*Biosphere Reserve*), enam kawasan konservasi sebagai *ASEAN Heritage Site*, serta empat kawasan konservasi sebagai *UNESCO Global Geopark*. Penetapan status atau pengakuan global tersebut merupakan bukti pentingnya kawasan hutan dan keanekaragaman

hayati Indonesia bagi kepentingan Internasional.

Kawasan konservasi Indonesia berada dan dikelilingi oleh 6.381 wilayah administratif kelurahan/desa. Pada umumnya penduduk di desa-desa tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada kawasan konservasi di seluruh Indonesia, setidaknya terdapat 1,8 juta hektar lahan terbuka yang mengindikasikan kerusakan atau degradasi ekosistem. Hal tersebut wajar terjadi karena populasi penduduk Indonesia yang semakin besar. Kerusakan yang terjadi antara lain disebabkan oleh tumpang tindih penguasaan lahan kawasan konservasi dengan lahan yang dimanfaatkan dan diusahakan oleh masyarakat, penebang liar, perburuan liar serta kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor alam. Selain permasalahan tumpang tindih penguasaan lahan kawasan konservasi, keberadaan masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi juga semakin dituntut untuk segera mencapai kesepakatan penyelesaiannya.

Bangsa Indonesia memang terdiri dari masyarakat yang sangat majemuk. Secara etnolinguistik, bangsa Indonesia terdiri atas 1.128 suku bangsa yang terbagi dalam ribuan komunitas dan tersebar pada 74.094 desa definitif di seluruh Nusantara (Kemendagri, 2017 dalam Wiratno, 2018). Dari jumlah tersebut, 9.410 desa diantaranya berada di sekitar kawasan hutan (Nugroho dkk, 2017 dalam Wiratno, 2018). Sejumlah lembaga dan entitas mengusulkan data bahwa wilayah hutan adat seluas lebih kurang 1,65 juta hektar bagi lebih dari 134 komunitas



adat berada di dalam kawasan konservasi. Seluas 1,3 juta hektar atau 81% dari luas usulan tersebut berada di kawasan taman nasional. Berdasarkan hasil kajian spasial, 67% tutupan vegetasi dari usulan wilayah adat dimaksud, masih berupa hutan primer. Beberapa contohnya ada di kawasan TN Betung Kerihun seluas 193.716 hektar, kawasan TN Sebangau seluas 138.321 hektar, kawasan TN Kayan Mentarang seluas 750.733 hektar, serta kawasan TN Lore Lindu seluas 108.690 hektar (Wiratno, 2018).

Dengan tingkat keanekaragaman hayati Indonesia yang tinggi, dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan secara lestari dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Kawasan Konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk

*Sky Camp*

Lokasi:  
Taman Nasional  
Bantimurung Bulusaraung

Dokumentasi:  
Muhammad Nurhidayat

melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan Pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di dalamnya dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan rencana strategis dalam mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya baik pada kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi yang menjadi kantong habitat satwa liar maupun kawasan ekosistem esensial. Buku ini merupakan penjabaran dari rencana strategis bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem periode Tahun 2020-2024.

Tugas dan Fungsi Ditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang



penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;



Penyu Hijau  
*Chelonia mydas*

Lokasi:  
Taman Nasional Wakatobi

Dokumentasi:  
Ayub Gerit Polii

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  
Struktur organisasi Ditjen KSDAE berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

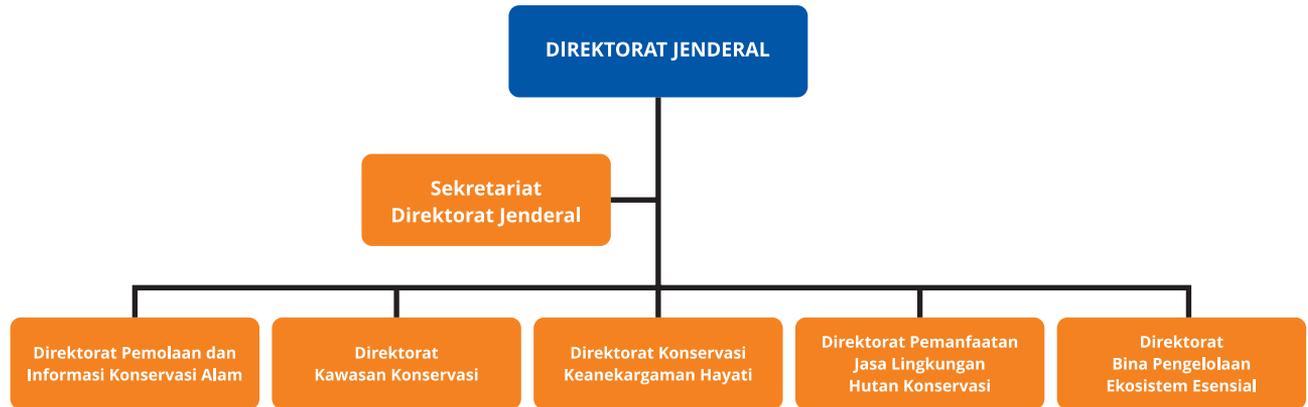
dan Kehutanan nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlihat pada Gambar 1.

Pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pembangunan KSDAE terbagi pada enam kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
3. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
5. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial; dan
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Tanggung jawab mencapai target pembangunan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing eselon II di tingkat pusat sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Teknis (UPT). UPT Ditjen KSDAE terdiri dari 26 UPT Konservasi Sumber Daya Alam dan 48 UPT Taman Nasional, sehingga total 74 UPT lingkup Ditjen KSDAE di seluruh Indonesia.

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE sampai dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

## KEGIATAN PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

- a. Peningkatan dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan

Rendahnya tingkat penyelesaian penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum selesai sehingga menimbulkan keraguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan, kurangnya data dan informasi potensi kawasan konservasi hasil inventarisasi potensi.

Mengingat pentingnya penataan zona dan blok sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi, maka dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2015-2019 telah ditetapkan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yaitu tersusunnya 150 Dokumen Penataan Zonasi Taman Nasional maupun Penataan Blok Non Taman Nasional. Secara kumulatif sampai tahun 2019 sebanyak 397 unit, sehingga maka capaiannya sebanyak 264,67%.

- b. Peningkatan rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi

Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Fungsi merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimana pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Selain merupakan amanah undang-undang, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kawasan konservasi. Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) KSA dan KPA adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan untuk diketahui kesesuaiannya dengan kriteria kawasan dan tujuan pengelolaannya.

Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi yang dilakukan dimaksudkan agar dalam perkembangannya, pengelola dapat memahami secara ilmiah bagaimana kondisi KSA dan KPA yang menjadi lingkup kerjanya dari waktu ke waktu. Dalam rangka pencapaian IKK, maka dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.14/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi dilakukan dengan metode *desk study*.

Dalam periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2015-2019, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi baru dilakukan di beberapa kawasan konservasi saja. Secara kumulatif sampai tahun 2019 sebanyak 546

unit , sehingga maka capaiannya sebanyak 104,80% jika dibandingkan dengan target sebesar 521 unit.

- c. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang *valid* dan reliabel

Persentase kenaikan/penurunan yang dicapai bernilai 0 atau tetap, karena target sepanjang tahun (2015 - 2019) konstan yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Hasil pengumpulan data dan peta potensi kawasan konservasi, kemudian dikelompokkan, dianalisa, disimpan, dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk aplikasi data.

Target paket data adalah konstan dari tahun 2015 - 2019, yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Oleh karena itu paket data dibagi menjadi paket data tahun 2015 sampai dengan paket data tahun 2019. Untuk perhitungan pencapaian ini pada Renstra (2015-2019) adalah bukan akumulasi dari capaian tahunan, melainkan tetap dikarenakan indikator paket data adalah pemutakhiran paket data 521 kawasan konservasi.

Berdasarkan acuan tersebut maka capaian Renstra 2015-2019 adalah sebesar 552 paket data yang telah dimutakhirkan dengan persentase capaian sebesar 105,95%.

- d. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional

Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan - kawasan non taman nasional. Saat

ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar KSDA, dimana organisasi ini belum menjadi sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar KSDA.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 telah ditetapkan 100 unit KPHK non taman nasional yang harus operasional. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016 untuk memberikan arahan atau pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari.

Dalam Renstra tahun 2015-2019 target lima tahunan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 unit, dan sampai dengan tahun kelima periode Renstra, telah beroperasi sebanyak 114 unit KPHK. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan selama lima tahun (114%).

- e. Kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi

Dalam upaya mendukung tata kelola pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah telah membuka ruang kerja sama penyelenggaraan di KSA dan KPA berdasarkan Pasal 43, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2011 Jo. Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KSA dan KPA, bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Sesuai dengan Renstra yang memiliki target PKS sebanyak 20 per tahun, maka sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 memiliki

akumulasi sebanyak 306 dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan persentase capaian sebesar 306%.

- f. Pembuatan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) pada kawasan konservasi

Integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan KK ke dalam peta RBI 1:50.000 (OMP) merupakan mandat Presiden melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016. Hal tersebut merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh hasil sesuai target dengan tersedianya peta zonasi/blok/arahan pengelolaan bagi 551 Kawasan Konservasi dengan rincian: peta arahan



*foto kiri*  
Ikan Badut

*foto kanan:*  
*Risbecia apolegma*

Lokasi:  
Taman Nasional Bunaken

Dokumentasi:  
Eko Handoyo

zonasi/blok Kawasan Konservasi yang telah diintegrasikan pada peta RBI skala 1:50.000 (format digital.shp) sejumlah 551 KK dengan persentase capaian sebesar 100%.

#### KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui perolehan indeks METT

Pentingnya eksistensi kawasan konservasi sebagai benteng perlindungan spesies dan keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan manusia, mendorong tekad pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan kawasan konservasi. Peningkatan kualitas tersebut perlu dimonitor dengan menggunakan metode yang sesuai yaitu dengan mengevaluasi pengelolaan kawasan konservasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan. Penilaian efektivitas dimaksudkan untuk mengkaji seberapa besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai efektivitas dengan baik, upaya penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalam kawasan telah dilakukan, sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan tersebut.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia diinisiasi sejak tahun 2010 melalui metode Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area Methodology (RAPPAM) dan Management Effectiveness

Tracking Tool (METT). Kemudian pada tahun 2015, Indonesia mengadopsi METT secara resmi menjadi kebijakan nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian METT sebagai alat evaluasi pengelolaan kawasan konservasi terdiri 3 lembar penilaian yaitu: 1) Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi yaitu berisi detail penilaian dan informasi dasar tentang situs; 2) Data Ancaman Kawasan Konservasi, yaitu berisi 52 jenis ancaman yang dihadapi kawasan konservasi; dan Lembar Penilaian yang terisi dari 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk 3 kolom untuk mencatat detail dari penilaian.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE target jumlah kawasan konservasi dengan nilai METT  $\geq 70\%$  pada tahun 2015-2019 sebanyak 260 unit KSA, KPA, dan TB. Secara kumulatif sampai tahun 2019 sebanyak 255 unit, sehingga maka capaiannya sebanyak 98,08%.

- b. Peningkatan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen pada tahun 2019. Berdasarkan akumulasi capaian dari tahun 2015-2019 sebanyak 211 dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dengan



Lutung Jawa  
*Trachypithecus auratus*

Lokasi:  
Taman Nasional Gunung  
Merapi

Dokumentasi:  
Ruky Umaya



demikian maka capaian kinerja tahun 2019 atau mencapai 140,67%.

Tercapainya target ini didukung dan selaras dengan salah satu upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan juga salah satu indikator operasionalisasi KPHK. Rencana pengelolaan (RPJP) merupakan dokumen utama dalam pengelolaan kawasan konservasi dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut.

- c. Peningkatan luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya

Lokasi yang menjadi target IKK ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor: SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tentang Penetapan lokasi pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 100.000 ha pada RPJMN 2015-2019. Namun demikian, lokasi non target tetap dapat dilakukan program pemulihan ekosistem jika terjadi kerusakan ekosistem yang berdampak signifikan. Capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan konservasi tahun 2019 merupakan capaian kerja tahun ke-5 dalam renstra.

Dalam perhitungan kumulatif, capaian pemulihan ekosistem mencapai 84.067,08 Ha atau sebesar 84,07%. Capaian target pemulihan ekosistem sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan dan memenuhi target tahunan, namun belum mencapai target jika diakumulasikan.

Program pemulihan ekosistem merupakan program nasional yang baru ditetapkan pada tahun 2015 sehingga perlunya penguatan dan persiapan prakondisi pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, kondisi tersebut tetap bergulir sesuai dengan perencanaan jangka menengah/milestone pemulihan ekosistem periode 2015-2019.

- d. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai Renstra 2015-2019 adalah 77 desa binaan yang dibina di daerah penyangga KSA KPA. Capaian sampai dengan tahun 2019 terdapat kegiatan pembinaan desa penyangga di 378 desa dengan persentase capaian sebesar 490,91% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019. Terdapat 130 desa merupakan desa yang termasuk dalam SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.80/KSDAE/SET/KSA.1/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

Selain itu, terdapat juga usaha ekonomi yang telah tercipta di 324 kelompok desa adalah 361 jenis, antara lain usaha peternakan dan perikanan, budidaya HHBK (termasuk madu), jasa ekowisata, pertanian dan perkebunan, kuliner, pembuatan souvenir, persewaan, usaha pupuk dan pakan ternak.

- e. Pengelolaan kawasan hutan konservasi pada zona tradisional melalui kemitraan

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan

capaian secara signifikan (seluas 39.197,86 Ha) yang didorong oleh terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA. Sebelum terbitnya peraturan tersebut beberapa UPT taman nasional telah melakukan kemitraan dalam konteks penguatan fungsi, terutama dalam kegiatan pemungutan HHBK. Melalui kerjasama pemberian akses di zona tradisional tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan konservasi telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerjasama penguatan fungsi/kemitraan konservasi tersebut masyarakat sekitar kawasan konservasi mendapatkan kesempatan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai ekonomi seperti madu, getah pinus, getah damar, jernang, kelukup, bambu, pandan, tanaman obat, rotan, tengkawang, jamur, rumput-rumputan sebagai pakan ternak dan buah-buahan hutan. Selain pemungutan HHBK, akses pemanfaatan juga diberikan dalam hal pengambilan berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya, pemanfaatan hasil budidaya tradisional berupa hasil kebun/ladang/pertanian, perikanan. Pemungutan HHBK menempati proporsi yang paling besar dalam kerjasama pemberian akses pemanfaatan zona tradisional kepada masyarakat saat ini.

Capaian luas kawasan yang dikelola melalui kemitraan pada zona tradisional sampai dengan tahun 2019 seluas 592.889,67

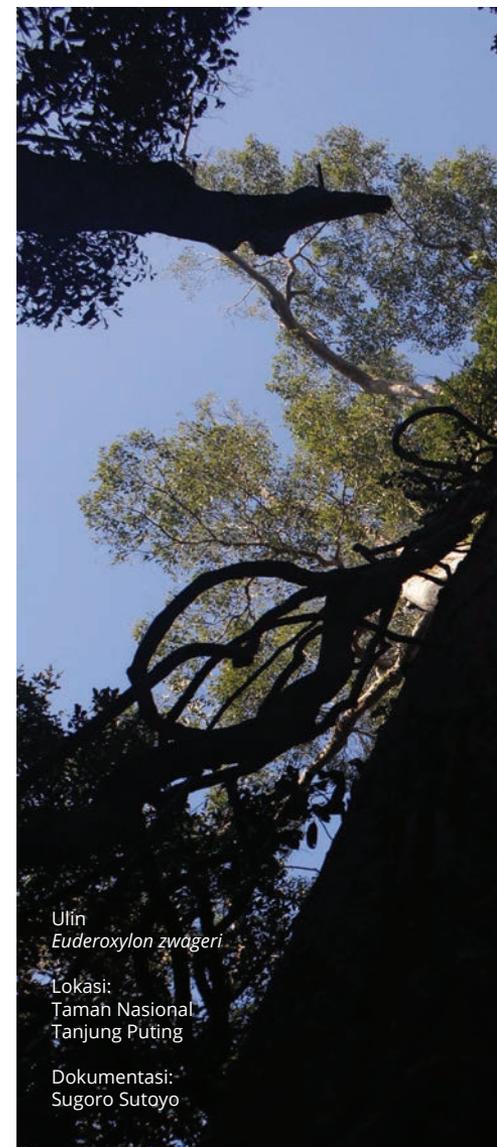
Ha dengan persentase capaian 592,89% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 sebesar 100.000 Ha.

- f. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional

Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan - kawasan non taman nasional. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar Taman Nasional, dimana organisasi ini belum menjadi sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar Taman Nasional.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 telah ditetapkan 100 unit KPHK non taman nasional yang harus operasional. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016 untuk memberikan arahan atau pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari.

Dalam Renstra tahun 2015-2019 target lima tahunan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 unit, dan sampai dengan tahun kelima periode Renstra, telah beroperasi sebanyak 106 unit KPHK. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini telah



Ulin  
*Eudoroxylon zwageri*

Lokasi:  
Taman Nasional  
Tanjung Puting

Dokumentasi:  
Sugoro Sutoyo



melebihi target yang ditetapkan selama lima tahun (106%).

g. Perlindungan dan pengamanan kawasan

Target IKK Perlindungan Pengamanan Kawasan Konservasi pada Tahun 2019 sesuai Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebesar 34 Provinsi. Terhadap target tersebut, Ditjen KSDAE setiap tahunnya melaksanakan pemantauan terkait pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Ditjen KSDAE. Pada tahun 2018, jumlah pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan telah diterima dari 34 Provinsi dengan persentase capaian sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019.

**KEGIATAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI**

a. Peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*

Persentase peningkatan populasi satwa diberikan batasan maksimal 150%, untuk menghindari adanya persentase peningkatan populasi yang terlalu tinggi. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 180/IV/KKH/2015, satwa prioritas terancam punah yang dimonitoring populasinya sejumlah 25 spesies. Sampai dengan tahun kelima periode Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019, capaian atas indikator peningkatan populasi 25 spesies prioritas terancam punah sudah mencapai 40,77%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 10%

maka capaian kinerja sudah mencapai 407,7%. Keberhasilan peningkatan populasi spesies di site monitoring yang dilihat dari penambahan individu baru, juga didukung dengan upaya konservasi yang lain sebagai intervensi pengelolaan.

Peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau site monitoring dilihat karena adanya kelahiran maupun penambahan individu didalam suatu populasi karena kegiatan pelepasliaran. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama, karena banyak faktor yang menentukan diantaranya seks rasio, struktur umur pada populasi tersebut dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu lama untuk berkembangbiak.

b. Penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi

Target penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi tahun 2018 adalah 6 spesies. Sedangkan pencapaian realisasi penambahan jenis satwa liar terancam punah prioritas yang dikembangbiakan pada Lembaga Konservasi adalah sebanyak 8 spesies. Capaian realisasi IKK penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi

tahun 2015-2019 adalah sejumlah 23 spesies. Realisasi penambahan spesies dengan begitu sudah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 10 (sepuluh) dengan persentase pencapaian sebesar 230%.

Keberhasilan pencapaian IKK tersebut tidak luput dari peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pengembangbiakan jenis satwa liar dan tumbuhan alam, selain itu adanya andil besar dari pihak pengelola lembaga konservasi yang telah mengupayakan pengembangan spesies target di lembaga konservasi yang dikelola.

- c. Peningkatan sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri

Target kegiatan penangkaran TSL selama 5 tahun (2015-2019) berupa jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam keluar negeri sebanyak 50 unit. Sampai dengan tahun kelima yaitu tahun 2019, jumlah sertifikat jaminan kualitas penangkaran yang telah diterbitkan oleh Dirjen KSDAE sebanyak 79 sertifikat dengan persentase pencapaian 158%. Keberhasilan pencapaian dikarenakan telah dilaksanakan audit massal pada unit penangkaran karang hias sehingga sertifikat jaminan kualitas penangkaran yang terbit meningkat secara signifikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

- d. Peningkatan nilai ekspor pemanfaatan satwa

liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting*

Capaian nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* dari tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 43.327.000.000.000,- atau sebesar 173,31% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 25 Triliun. Capaian tersebut merupakan devisa negara dari pemanfaatan 13 kelas komoditi yaitu sebagai berikut : Mamalia, Reptil, Amphibi, Burung, Arthropoda, Ikan, Coral, Mollusca, Gaharu, Anggrek, Sonokeling, Pakis, dan Pasak Bumi.

- e. Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam

Realisasi PNBP dari Pemanfaatan TSL tahun 2018 sebesar Rp. 92.600.000.000,- atau sebesar 173,31% dari target tahunan (Rp. 10 Miliar/tahun). Nilai tersebut diperoleh dari iuran pemanfaatan TSL dalam negeri dan luar negeri antara lain: iuran izin pengedar (dalam negeri dan luar negeri), izin penangkaran, izin lembaga konservasi, izin pengambilan sampel penelitian, pungutan perdagangan TSL ke luar negeri, pungutan administrasi pemanfaatan TSL serta PNBP yang berasal dari pungutan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun Taman Nasional.

- f. Ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan reliabel

Data dan informasi keanekaragaman hayati (kehati) perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman genetik, jenis, habitat, populasi, dan distribusinya



Orangutan  
*Pongo pygmaeus*

Lokasi:  
Taman Nasional  
Tanjung Puting

Dokumentasi:  
Sugoro Sutoyo



untuk sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun data dan informasi yang tersebar di berbagai kalangan. Manfaat adanya basis data kehati adalah dapat digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan kehati yang ada di Indonesia. Kehati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia. Peran langsung kehati diantaranya sebagai sumber pangan, kesehatan/obat-obatan.

Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliabel pada 7 wilayah biogeografi tahun 2018 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 7 paket data, sehingga capaian kinerjanya 100%.

- g. Penerbitan *Prior Informed Consent (PIC)* pemanfaatan sumberdaya genetik

Ditjen KSDAE telah melakukan beberapa kegiatan berupa penentuan PNPB atas pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG), antara lain mendiskusikan dan identifikasi prioritas-prioritas penelitian terkait sumber daya genetik dan biologi molekuler; mendiskusikan kebutuhan pengaturan pengelolaan sumber daya genetik terutama akses, kepemilikan dan kelembagaan pengaturan SDG Indonesia dan

mendiskusikan etika penelitian dan manfaat yang didapat untuk Indonesia atas hasil penelitian. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi rumusan masukan untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik di tingkat pusat dan daerah terutama untuk kegiatan penelitian.

Realisasi Jumlah Prior Informed Consent (PIC) Pemanfaatan Sumberdaya Genetik dari tahun 2015-2019 mencapai 61 PIC dari target yang ditetapkan sebesar 10 PIC, sedangkan persentase capaian mencapai 610%.

- h. Hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik

Target jumlah assesment aman lingkungan terhadap produk rekayasa genetik pada Renstra tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 20 assesment aman lingkungan PRG dan telah tercapai dengan jumlah assesment aman lingkungan sebanyak 24 assesment. Hal tersebut menandakan bahwa subdit keamanan hayati dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi sebesar 120%.

- i. Pembentukan dan pengoperasian sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik

Pembangunan Balai Kliring (*Clearing House*) akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya genetik di tingkat nasional dimaksudkan sebagai media untuk tukar menukar data dan informasi terkait pemanfaatan sumberdaya genetik antar kementerian/lembaga terkait. Kelembagaan

Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) termasuk didalamnya kelembagaan Balai Kliring Sumber Daya Genetik Akses dan Pembagian Keuntungan (BK SDG) telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.775/MENLHK/KSDAE/KUM.0/9/2006 tanggal 23 September 2016 tentang Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati.

POKJA BKKHI terdiri dari berbagai pihak terkait penyedia data dan informasi kehati. Salah satu tugas POKJA ini adalah sinergi dan koordinasi dalam operasionalisasi Balai Kliring Kehati termasuk di dalamnya penyusunan sistem data dan informasi kehati nasional BKKHI telah di re-desain dan disesuaikan dengan mandat CBD yaitu adanya konten khusus untuk monitoring implementasi IBSAP.

Telah dibangun Balai Kliring Sumber Daya Genetik Akses dan Pembagian Keuntungan (BK SDG) sebagai mandat dari Protokol Nagoya. Pada tahun 2017, pengembangan Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan ditargetkan dengan membangun sistem perizinan online bagi peneliti untuk memudahkan proses perizinan yang transparan, efektif dan efisien. Output yang diharapkan adalah terbangunnya 1 unit portal balai kliring sumber daya genetik. Dengan demikian target Renstra 2015-2019 telah tercapai dengan persentase capaian 100%.

- j. Pembangunan pusat pengembangbiakan

dan suaka satwa (*sanctuary*) spesies terancam punah

Suaka satwa (*sanctuary*) merupakan unit penyelamatan, rehabilitasi serta pengembangbiakan bagi satwa terancam punah yang membutuhkan biaya yang besar mulai dari pembangunannya hingga pengelolannya. Olehkarenaitu, pencermatan terhadap usulan pembangunan suaka satwa serta analisa terhadap kebutuhan suaka satwa bagi satwa tertentu sangat diperlukan. Lebih dari sepuluh usulan pembangunan suaka satwa diusulkan oleh UPT Balai KSDA maupun Balai Taman Nasional.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan suaka satwa, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendukung proses penyusunan dokumen rancang bangun suaka satwa. Usulan pembangunan suaka satwa dibahas bersama dengan Species Specialist Group yang sudah dibentuk oleh Direktur Jenderal KSDAE. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah terbangun 23 unit sanctuary dengan persentase capaian sebesar 46% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 sebesar 50 unit.

Permasalahan pencapaian yaitu belum adanya roadmap suaka satwa/*sanctuary* yang menjadi pedoman dan standar untuk pembangunan suaka satwa di UPT. Upaya yang telah dilakukan yaitu melanjutkan koordinasi dengan LIPI, Universitas, NGO dan para ahli dalam penyusunan roadmap suaka satwa.



*Schooling Jack Fish*

Lokasi:  
Taman Nasional Wakatobi

Dokumentasi:  
Ayub Gerit Polii



- k. Jumlah kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati

Kegiatan Peningkatan Kertas Posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional Bidang Perundingan Perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati dilaksanakan di beberapa lokasi tergantung target yang akan dicapai, seperti DKI Jakarta, Bogor, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Geneva - Switzerland, Sochi - Rusia, Montreal - Kanada dan Mesir. Jumlah kertas posisi Indonesia dalam pertemuan Internasional bidang perundingan perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati selama tahun 2015-2019 adalah sebanyak 20 kertas posisi dari target 12 kertas posisi sehingga realisasinya mencapai 166,67%.

Keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan oleh adanya beberapa pertemuan internasional yang terkait isu - isu strategis untuk mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang perlu dihadiri antara lain : *22th Meeting of SBSTTA in Montreal, Canada, The Second Meeting of the Subsidiary Body on Implementation in Montreal, Canada, dan UN Biodiversity Conference (COP 14 Convention on Biological Diversity) in Sharm El Sheikh, Egypt.*

#### KEGIATAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

- a. Kunjungan wisata ke kawasan konservasi

minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 2.059.343 orang wisman, sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang wisman. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2019 terhadap target selama 5 tahun (1.500.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 137,29% atau sudah terlampaui. Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia.

- b. Kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 31.873.624 orang wisnus sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 20.000.000 orang wisnus. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2019 terhadap target pencapaian kinerja selama 5 tahun (20.000.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 159,37% atau sudah terlampaui. Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia.

- c. Penambahan unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 318 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah terlampaui atau telah tercapai sebesar 318% atau sudah melampaui. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam disini berupa Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA).

- d. Pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk keperluan sehari-hari dan jumlah tenaga yang diserap dalam rangka pengusahaan pemanfaatan air di kawasan konservasi. Pada tahun 2018, kegiatan ini memberikan kontribusi PNBPN untuk kepada Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air sebesar Rp. 149.219.434,-

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 150 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (25 unit), maka target tersebut sudah terlampaui atau telah tercapai sebesar 600%.

- e. Pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant*

Kegiatan pemanfaatan energi air di kawasan konservasi, selain dapat memberikan manfaat kepada juga ke Negara berupa PNBPN, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energi air. Outcome dari kegiatan pemanfaatan energi air ini adalah jumlah Kwh yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 sebesar 969 kilo Watt melayani sekitar 1521 rumah tangga disekitar kawasan konservasi, sedangkan dari kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kapasitas sebesar 30.700 kilo Watt (30,7 MW).

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah tercapai kinerja sebesar 59 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 50 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (50 unit), maka target tersebut sudah tercapai sebesar 118%.

Pada pertengahan tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/ Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, sehingga berdampak kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di



Akar Bahar/Kipas Laut  
*Euplexaura sp.*

Lokasi:  
Taman Nasional Wakatobi

Dokumentasi:  
Chris Awang



Jamur Morel  
*Morchella crassipes*

Lokasi:  
Taman Nasional  
Gunung Rinjani

Dokumentasi:  
Teguh Rianto



Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam untuk disesuaikan/direvisi, hal ini berakibat lamanya pelayanan berusaha karena perusahaan yang seharusnya mendapatkan izin definitif terhambat.

- f. Pengoperasian kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

Hutan mampu memasok energi terbarukan untuk kebutuhan manusia. Saat ini sumber energy terbarukan tersebut belum banyak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya memerlukan dana yang besar, resiko yang tinggi, teknologi tinggi, dll. Meskipun pemanfaatan masih rendah, Indonesia telah mengembangkan teknologi dan mengimplementasikan pembangunan PLTP (panas bumi) dan PLTS (Surya) di beberapa lokasi di Indonesia.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNPB kepada Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai sebanyak 4 unit atau

sebesar 80%.

- g. Registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+*

Proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi merupakan bagian dari implementasi kegiatan inti rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca bidang kehutanan dan lahan gambut melalui upaya pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (2 unit), maka target tersebut sampai dengan tahun 2019 telah tercapai sebanyak 2 unit atau telah tercapai sebesar 100%.

#### **KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL**

- a. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya

Di dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 jumlah unit KEE yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit. Sampai dengan tahun kelima Renstra, telah terealisasi sebanyak 55 unit atau sekitar 114,58%. Pencapaian hingga tahun 2019 adalah terbentuknya kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan kelembagaannya oleh pemerintah daerah setempat dengan kawasan ekosistem esensial, meliputi kawasan taman kehati, kawasan koridor, serta kawasan karst.

- b. Penyediaan paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial

Secara kumulatif, dibandingkan dengan

target 5 tahun (48 paket), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 52 paket data adalah 108,33%.

- c. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu

Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (48 dokumen), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 38 dokumen adalah 79,17%.

Tidak tercapainya target ini dikarenakan banyak faktor, antara lain Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan KEE sampai saat ini belum disahkan, anggaran penyusunan rencana aksi yang tidak sebanding dengan target yang ditetapkan, anggaran BKSDA terkait KEE jumlahnya masih terbatas sebagian BKSDA tidak memiliki anggaran KEE karena belum menjadi kegiatan prioritas, proses penyusunan rencana aksi butuh waktu (setahun atau lebih) karena banyak pihak yang terlibat. Capaian tahun 2019 untuk rencana aksi pengembangan pengelolaan KEE adalah tersedianya rencana aksi yang merupakan rencana kerja yang disusun bersama oleh anggota forum yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota forum pengelolaan anggota KEE.

- d. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya

Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (6 KEE), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan

total sebanyak 6 kawasan adalah 100%.

Pada tahun 2018, fokus Ditjen KSDAE dalam bidang Karst adalah untuk melakukan penataan dan pengelolaan wilayah karst di beberapa daerah. Penataan dan pengelolaan ini bertujuan untuk membagi jenis peruntukan lindung dan budidaya di kawasan karst. Penataan dan pengelolaan Karst ini dilakukan berdasarkan Draft RPP Karst yang telah disusun oleh Ditjen KSDAE. RPP ini juga mengadopsi beberapa aturan terdahulu, peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

- e. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya

Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (6 Ekoregion), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 6 ekoregion adalah 100%.

- f. Pengupayaan konservasi koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah

Secara kumulatif, dibandingkan dengan target 5 tahun (300 Spesies), maka capaian kinerja kumulatif untuk tahun 2015-2019 dengan total sebanyak 475 spesies adalah 158,33%. Capaian kinerja terkoleksinya spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang melebihi target disebabkan kesadaran dari pengelola taman kehati (Pemda dan perusahaan) untuk menambah koleksi spesies lokal/endemik di areal taman kehati yang dikelola.

## KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Untuk mengukur pencapaian kinerja, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatannya yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019.

Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Ijtjen-Setitjen/2015 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dihasilkan dari kegiatan evaluasi atas penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahunnya. Pencapaian nilai Direktorat Jenderal KSDAE juga lebih cepat dari target pencapaian nilai SAKIP jangka menengah (Renstra) yaitu sebesar 78,00 poin pada tahun 2019. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 78,44 poin dengan persentase capaian sebesar 100,56%.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kawasan konservasi, sebagaimana umumnya kawasan hutan di seluruh Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin berat dan kompleks, yang potensial menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Hal tersebut menjadi penyebab fenomena "*Island Habitat*". Degradasi hutan dan fragmentasi habitat tersebut merupakan dampak dari kebakaran hutan, perambahan kawasan untuk pertanian dan perkebunan, penebangan liar, penambangan tanpa izin (PETI), dan lain-lain. Tekanan tersebut berdampak langsung pada kualitas dan fungsi kawasan konservasi.

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE antara lain dapat diidentifikasi dari isu strategis yang berkembang. Isu strategis tersebut antara lain:

### 1. Kerusakan habitat akibat pengaruh alam dan manusia

Kerusakan alam di Kawasan konservasi dan pada daerah diluar Kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dapat diakibatkan pengaruh alam seperti banjir, tsunami, letusan gunung berapi, dan gempa bumi, contohnya yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2018. Selain itu kerusakan alam dapat terjadi akibat pengaruh manusia, akibat perubahan bentang alam dari Kawasan hutan menjadi area terbuka sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau pertambangan ilegal yang mengakibatkan serapan air ke dalam tanah berkurang sehingga menjadi potensi bencana

apabila terdapat pada bukit dengan kemiringan terjal yang mengakibatkan terjadi bencana longsor ketika intensitas hujan tinggi seperti di Jawa Barat pada tahun 2019 dan Banten pada Tahun 2020.

## 2. Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Pelaku atau barang bukti perdagangan ilegal satwa liar banyak ditemukan pada pusat transportasi publik, baik di udara melalui bandara, di laut melalui pelabuhan, dan di darat melalui terminal-terminal bis antar kota. Sumber satwa liar ilegal biasanya didapatkan dari wilayah timur Indonesia, kemudian didistribusikan ke konsumennya yang berada wilayah barat Indonesia maupun ke luar negeri. Hal ini menjadi perhatian bagi semua aparat penegak hukum, dalam hal ini Ditjen KSDAE bekerja sama dengan Polisi, Aparat Bea Cukai, maupun Aparat Perhubungan untuk mengamankan dan memberantas perdagangan satwa liar tersebut.

## 3. Konflik Satwa dan Manusia

Konflik satwa dan manusia biasanya terjadi antara umbrella species (satwa payung) yang keberadaannya dapat mewakili kondisi keanekaragaman hayati di ekosistemnya, seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*) dengan manusia yang tinggal di sekitar habitatnya. Satwa ini biasanya mencari makanan yang berada di area perkebunan milik manusia karena ketersediaan pakan yang menipis di habitatnya maupun karena habitatnya sudah dirusak oleh manusia. Hal ini menjadi perhatian karena satwa-satwa dilindungi tersebut pengelolaannya menjadi tanggung jawab

pemerintah.

## 4. Pengelolaan Pengunjung Kawasan Konservasi belum optimal

Pengelolaan pengunjung di Kawasan konservasi perlu dioptimalkan baik dari segi sarana dan prasarana penunjang maupun dari saat pembelian tiket (*ticketing*), disamping itu keamanan pengunjung menjadi prioritas penting dalam mengelola pengunjung Kawasan konservasi yang meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini mutlak diperlukan untuk kenyamanan pengunjung dan tanggung jawab pengelola untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut.

## 5. Pengelolaan Sampah di Kawasan Konservasi

Sampah menjadi masalah di daerah wisata khususnya wisata Kawasan konservasi, jalur pendakian dan tepi pantai banyak menjadi tempat sampah yang dibuang secara sembarangan oleh pengunjung. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari pihak pengunjung dan masyarakat sekitar untuk membantu memungut dan membuang sampah pada tempatnya, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di tempat wisata oleh pengelola.

## 6. Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang belum optimal

Jasa lingkungan di Kawasan konservasi berupa panas bumi, air, energi air, karbon dan bentang alam yang menjadi tempat wisata perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini masih banyak jasa lingkungan yang belum dioptimalkan akibat belum adanya aturan, maupun tumpang tindih aturan terkait pemanfaatan potensi jasa lingkungan tersebut.

## 7. Keterbatasan Sumber Daya (SDM, Sarpras, dan

### Anggaran)

Keterbatasan sumber daya manusia dirasakan oleh seluruh instansi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen KSDAE pada tahun 2020 ini memiliki 6.424 orang ASN dan 3.308 pegawai kontrak yang terdaftar dalam sistem kepegawaian, total 9.732 orang atau 2.789 Ha/orang, jauh dari jumlah ideal untuk mengawasi Kawasan konservasi seluar 27,14 hektar sehingga diperlukan strategi dalam mengelola Kawasan d iatas keterbatasan sumber daya manusia tersebut. Disamping itu, sarana dan prasarana yang masih

minim serta anggaran kegiatan yang hanya berkisar antara 50.000-70.000 rupiah/hektar/tahun jauh dari alokasi anggaran ideal dalam mengelola Kawasan konservasi. Hal ini menjadi perhatian bagi Ditjen KSDAE dalam memenuhi pendanaan berkelanjutan untuk Kawasan konservasi.

Berdasarkan ekstraksi dari isu-isu strategis di atas, serta hasil-hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Direktorat Jenderal KSDAE dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada seperti tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Analisis SWOT



Rangkong Sulawesi  
*Rhyticeros cassidix*

Lokasi:  
Taman Nasional Bantimurung  
Bulusaraung

Dokumentasi:  
Muhammad Nurhidayat

Alternatif-alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut, berdasarkan analisis SWOT antara lain sebagai berikut:

1. Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di hutan konservasi dengan melibatkan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi karena jumlah SDM yang belum memadai.
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar serta pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat keberadaan hutan konservasi, serta menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan konservasi.
4. Mengoptimalkan koordinasi multipihak seperti Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau pihak lainnya dalam mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah yang beririsan dengan kawasan konservasi.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial.
6. Meningkatkan perbaikan tata kelola pembangunan hutan konservasi.



*Feeding Ground*  
Sadengan

Dokumentasi:  
Ahmad Maulana

Lokasi:  
TN Alas Purwo



Tarsius  
*Tarsius fuscus*

Dokumentasi:  
Indra Pradana

Lokasi:  
TN Bantimurung Bulusaraung

## BAB DUA

# Visi, Misi, Tujuan 2020-2024

## 2.1. VISI DAN MISI PRESIDEN MASA BAKTI 2020-2024

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah **"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"**. Langkah yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan

- berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
  6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
  7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
  8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
  9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat

menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

## 2.2. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS DITJEN KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem,

spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah **“Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat”** yang mendukung **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas;
2. Mewujudkan pemanfaatan TSL yang berkualitas;
3. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas;
4. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan
6. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam dan di luar hutan konservasi;
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi yang efektif; dan
6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tsl;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tsl secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.





Katak Pohon Harlequin  
*Rhacophorus pardalis*

Dokumentasi:  
Fajar Dewanto

Lokasi:  
TN Tanjung Puting

**BAB  
TIGA**

# Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan Ditjen KSDAE

45

## 3.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KLHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan hutan berdasarkan RKTN Tahun 2011-2030; dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

1. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan

Rencana  
Strategis

2020  
2024

DIREKTORAT  
JENDERAL  
KONSERVASI  
SUMBERDAYA  
ALAM DAN  
EKOSISTEM

Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 mempunyai arti penting dalam evaluasi kinerja pengurusan dan pembangunan kehutanan, penyesuaian dengan perkembangan paradigma dan tantangan strategis nasional, regional dan global, penelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait, reformasi pengurusan kehutanan sampai dengan tahun 2030 serta acuan bagi para pihak dalam penyelenggaraan pengurusan dan pembangunan kehutanan sampai dengan tahun 2030.

Kondisi umum berdasarkan RKTN tersebut Fungsi Hutan Kawasan Konservasi meningkat sebesar 0,61 juta hektar dari 26,82 juta hektar pada tahun 2011 menjadi 27,43 juta hektar pada tahun 2018 termasuk luas kawasan konservasi perairan sebesar 5,32 juta hektar.

Visi RKTN 2011-2030 adalah “Tata Kelola kehutanan untuk berfungsinya sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat”. Misi pembangunan kehutanan terdiri atas 6 (enam) misi yaitu mewujudkan kecukupan luas kawasan hutan yang proporsional, reformasi sistem tata kelola kehutanan, mewujudkan pengelolaan multi manfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, mewujudkan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menguatkan posisi kehutanan di tingkat nasional, regional dan global.

Tujuan pembangunan kehutanan 2011-2030

adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya luas kawasan hutan yang cukup dengan fungsi dan sebaran yang proporsional dalam memenuhi tantangan nasional dan global;
2. Terwujudnya tatanan baru penyelenggaraan kehutanan;
3. Terwujudnya multi manfaat hutan yang optimal pada semua fungsi hutan;
4. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kontribusi optimal kehutanan dalam pembangunan yang berkeadilan;
5. Terwujudnya pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan; dan
6. Meningkatnya pengakuan peran dan posisi kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.

Pada arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan, disebutkan bahwa Hutan Konservasi seluas 27,42 juta hektar diarahkan untuk prioritas rehabilitasi sebesar 1 juta hektar sampai dengan tahun 2030, dengan 26,42 juta hektar tetap dipertahankan sebagai kawasan untuk konservasi. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk konservasi sumber daya hutan, dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Kawasan konservasi merupakan sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengawetan merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu produk

hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan serta wisata alam harus menjadi komoditas unggulan sektor kehutanan dalam arahan kawasan untuk konservasi. Pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa liar baik jenis maupun genetik, produk jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif. Pemanfaatan di kawasan konservasi juga harus tetap memperhatikan perlindungan dan pengawetan, sebagai bagian dalam pencegahan kerusakan sistem penyangga kehidupan. Biaya pemulihan dari rusaknya sistem penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai ekonomi dari kawasan konservasi. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi pada RKTN tercantum pada tabel 1.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibuat untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Isu strategis Tahun 2020-2024 antara lain terbagi dalam 4 (empat) isu yaitu:

1. Tata Kelola dan Kelembagaan, Tata kelola Sumber Daya Hutan (SDH) dan Lingkungan Hidup (LH) yang mantap, terdiri atas:
  - a. Pemantapan Kawasan Hutan,
  - b. *Mainstreaming* Perubahan Iklim,
  - c. *Enabling Condition*,
  - d. SDM Unggul dan Berdaya Saing, dan

- e. Pengarusutamaan Gender.
2. Isu Sosial, Kesejahteraan masyarakat berbasis SDH dan LH, terdiri atas:
  - a. Perhutanan Sosial,
  - b. TORA,
  - c. Kesenjangan Antar Wilayah, dan
  - d. Akses Pasar dan Permodalan.
3. Isu Lingkungan, Kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri dari:
  - a. Ketahanan Air,
  - b. Pengelolaan Sampah, B3
  - c. Kerusakan Lingkungan,
  - d. Kualitas Udara,
  - e. Keanekaragaman Hayati
  - f. Kesehatan Masyarakat, dan
  - g. Pendidikan Lingkungan.
4. Isu Ekonomi, Kontribusi SDH dan LH terhadap perekonomian nasional, terdiri atas:
  - a. Peningkatan HHK (Hasil Hutan Kayu),
  - b. Peningkatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu),
  - c. Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) & *Bioprospecting*,
  - d. Jasa Lingkungan, dan
  - e. *Circular Economy*.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan dalam menentukan arah kebijakan strategi sektor LHK yaitu **Holistik** yaitu penjabaran tematik program presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan, **Integratif** yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/

**Tabel 1.** Kebijakan dan Strategi Kawasan Konservasi pada RKTN 2011-2030

Kebijakan	Strategi	Milestone 2011-2030
Optimalisasi pemanfaatan kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian rancangan blok/zonasi dan dokumen perencanaan lainnya</li> <li>2. Mengalokasikan luasan yang layak untuk blok/zona tradisional dan blok/zona pemanfaatan</li> <li>3. Memfokuskan kegiatan kemitraan konservasi, kerja sama penguatan fungsi dan kerja sama strategis yang tak dapat dielakkan</li> </ol>	v
Peningkatan manfaat jasa ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi/pemasaran jasa lingkungan</li> <li>2. Penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam</li> <li>3. Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif</li> <li>4. Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk jasa lingkungan</li> <li>5. Melakukan perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari <i>cost centre</i> menjadi <i>profit centre</i>) tanpa menghilangkan fungsi konservasi</li> <li>6. Mengembangkan pelestarian sumber daya hutan dan ekosistem penting di luar kawasan hutan Negara, antara lain: Kawasan Ekosistem Esensial</li> </ol>	v
Konservasi keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan keanekaragaman hayati</li> <li>2. Perlindungan hutan dan silvikultur afirmatif untuk peningkatan keanekaragaman hayati dan nilai guna kawasan konservasi</li> <li>3. Konservasi keanekaragaman hayati di HCVF dan kawasan konservasi satwa liar</li> <li>4. Pengelolaan koridor keanekaragaman hayati untuk spesies-spesies penting</li> <li>5. Pencegahan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi</li> <li>6. Mempromosikan spesies yang bernilai konservasi tinggi pada lahan milik dan komunal</li> <li>7. Mengembangkan usaha-usaha restorasi keanekaragaman hayati pada kawasan konservasi</li> <li>8. Perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah</li> <li>9. Peningkatan jenis satwa liar yang dapat ditangkarkan diluar habitatnya</li> <li>10. Penyesuaian peraturan penangkaran dan budidaya tumbuhan dan satwa liar berkoordinasi dengan <i>Scientific Authority</i></li> </ol>	v

Optimalisasi kawasan yang diakui internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Cagar Biosfer, <i>World Heritage Site (WHS)</i>, <i>Asean Heritage Site (AHS)</i></li> <li>2. Meningkatkan jaringan kerja sama internasional, <i>multi stakeholder, partnership</i>, termasuk dengan masyarakat</li> </ol>	v
Pengelolaan efektif kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resorts</li> <li>2. Evaluasi fungsi kawasan konservasi</li> <li>3. Perlindungan dan Pengamanan kawasan konservasi</li> <li>4. Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang mengalami kerusakan</li> </ol>	v

Lembaga/Daerah/Pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan, **Tematik** yaitu penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu, dan **Spasial** yaitu penjabaran program presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah, keempat pendekatan tersebut disingkat **HITS**, kemudian ditambah dengan pendekatan *money follow program*, dimana anggaran mengikuti program prioritas nasional yang dilaksanakan.

Arah kebijakan dan strategi sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 meliputi:

1. SS-1 Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim yang mencakup pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi serta ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah, penurunan laju deforestasi dan pemulihan DAS dan perlindungan sumber daya air dan

2. SS- 2 Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang mencakup peningkatan daya saing produk kehutanan dan perkuatan sirkuler ekonomi untuk mendukung perekonomian nasional, dan peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
3. SS-3 Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang mencakup pemantapan kawasan hutan untuk menjaga keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan, dan peningkatan akses kelola hutan dan penguatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
4. SS-4 Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, yang mencakup penguatan tata kelola pembangunan LHK serta peningkatan produktivitas dan daya saing ASN KLHK dan non-aparatur LHK.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

Bekerja bersama mengelola kawasan dengan para pemangku kepentingan kunci di sekitar kawasan konservasi, seperti masyarakat desa, sektor swasta, organisasi sipil masyarakat, serta akademisi dari universitas lokal adalah suatu pendekatan baru yang perlu dilakukan. Menempatkan masyarakat sebagai mitra kunci sangat penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi kawasan konservasi, lalu diteruskan dengan membangun dan mengembangkan agenda bersama serta mengimplementasikannya secara kolaboratif. Terdapat tiga prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif, yaitu saling menghargai, saling mempercayai, dan saling bermanfaat, yang sebaiknya selalu mendapat perhatian secara memadai. Pendekatan termasuk akan membantu para pengelola kawasan konservasi dalam membangun hubungan dan mengembangkan hubungan mereka dengan masyarakat setempat.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diupayakan penyelesaiannya melalui dialog, membangun kesadaran dan menginisiasi *win-win solution* yang memungkinkan melalui penciptaan berbagai aktivitas alternatif. Pengelolaan HHBK, restorasi kawasan yang terdegradasi, pengembangan wisata alam, pembangunan pembangkit listrik tenaga air mini, serta usaha-usaha skala kecil lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat adalah beberapa contoh solusi penyelesaian permasalahan kawasan konservasi. Hal-hal

tersebut membutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat di berbagai level, yang dapat menjamin bahwa pengelola kawasan konservasi dapat lebih berpikiran terbuka dan lebih inklusif terhadap inovasi-inovasi baru.

Sepuluh cara meningkatkan kelola kawasan konservasi (Wiratno, 2018) antara lain, yaitu:

- (1) masyarakat sebagai subjek pengelolaan,
- (2) penghormatan pada HAM,
- (3) kerja sama lintas eselon I KLHK,
- (4) kerja sama lintas kementerian,
- (5) penghormatan nilai budaya dan adat,
- (6) kepemimpinan multi level,
- (7) pengambilan keputusan berbasis sains,
- (8) pengelolaan berbasis resort (lapangan),
- (9) pemberian penghargaan dan pendampingan, dan
- (10) membangun “organisasi pembelajar”.

Dari paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi tersebut, dapat disampaikan bahwa Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi; dan
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan



Ajag  
*Cuon alpinus*

Dokumentasi:  
Gendut Hariyanto

Lokasi:  
SPTNW I Tegaldlimo TN Alas Purwo

hutan konservasi.

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan mengacu pada regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran program tersebut, adapun identifikasi regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik

- dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973*;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetland of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;
14. Beserta aturan turunannya.

Pada lampiran dijelaskan kebutuhan kerangka regulasi lingkup Ditjen KSDAE pada periode 2020-2024.



### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial, dan pelaksanaan administrasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat Daerah yaitu 26 Satuan Kerja Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan 48 Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 7

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang ksdae;
11. Pengembangan bina cinta alam serta peyuluhan ksdae;
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional terbagi dalam 6 UPT Balai Besar Taman Nasional Tipe A, 2 UPT Balai Besar Taman Nasional Tipe B,

20 UPT Balai Taman Nasional Tipe A, dan 20 UPT Balai Taman Nasional Tipe B.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Unit Pelaksana Teknis KSDA menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang ksdae;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran

tumbuhan dan satwa liar;

12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan ksdae;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Unit Pelaksana Teknis KSDA terbagi dalam 3 UPT Balai Besar KSDA Tipe A, 5 UPT Balai Besar KSDA Tipe B, 11 UPT Balai KSDA Tipe A, dan 7 UPT Balai KSDA Tipe B.

Potensi Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal KSDAE tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.** Sebaran Pegawai Pusat dan UPT berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Lokasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Satker Pusat	181	161	342	5,3
2	74 UPT	4.846	1.236	6.082	94,7
	<b>Total</b>	<b>5.027</b>	<b>1.397</b>	<b>6.424</b>	<b>100</b>

**Tabel 3.** Sebaran Pegawai per Golongan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	IV	247	82	329	5,12
2	III	3.377	1.153	4.530	70,52
3	II	1.335	160	1.495	23,27
4	I	68	2	70	1,09
	<b>Total</b>	<b>5.027</b>	<b>1.397</b>	<b>6.424</b>	<b>100,00</b>

Data per-Agustus 2020

### 3.5. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok petani hutan yang mayoritas perempuan dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk pemanfaatan HHBK; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta

sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan tagging output yang responsif gender yaitu output terkait layanan dukungan manajemen dan output kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi



Ayam Hutan Merah (*Gallus gallus*)  
Ayam Hutan Hijau (*Gallus varius*)

Dokumentasi:  
Endarto

Lokasi:  
Taman Nasional Baluran



dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/*multiplier effect* dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya, Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Ditjen KSDAE mendorong peningkatan target kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Ditjen KSDAE mendorong *situation room* (sitroom) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang.



Macan Dahan  
*Neofelis diardi*

Dokumentasi:  
Kamera Trap Tim Stasiun Riset  
Cabang Panti

Lokasi:  
TN Gunung Palung

## BAB EMPAT

# Program dan Kegiatan

## 4.1. SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KSDAE

Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: (1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL. (3) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. (4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan (6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu: (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar), (2) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah), (3) Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah), (4) Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa), (5) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi (2,5 poin), dan (6) Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (80 poin).

Berdasarkan Redesign Sistem Program dan

Penganggaran pada Tahun 2020, terdapat revisi jumlah Program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dari 13 Program menjadi 6 Program, seperti disampaikan pada gambar 3.

Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, sekarang menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan, seperti pada tabel 4.

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 5.



Gambar 3. Redesign Sistem Program dan Penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Tabel 4.** Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE

No	Program Awal	Kegiatan	No	Program Baru	Kegiatan
1.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE 2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 3. Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Konservasi Spesies dan Genetik 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 6. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	1.	Dukungan Manajemen	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
			2.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
			3.	Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

**Tabel 5.** Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
029.WA Sasaran Program Dukungan Manajemen: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima								
1.	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati								
2.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TS								
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari								
4.	Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	283	200	410	630	860	1.100
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi								
5.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi								
6.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	Poin	56	52,5	55	57,5	60	62,5
029.FF Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup: Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan Konservasi								
7.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43

#### 4.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Terdapat 6 (enam) Kegiatan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem selama tahun 2020-2024 yaitu:

##### 1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi serta terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar), Jumlah unit

kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK) dan Jumlah mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (1 Mekanisme). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

##### 2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan *opened area* untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2.500 Desa), Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan

konservasi melalui kemitraan konservasi (400.000 Hektar), Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani (1,8 Juta Hektar), dan Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (554 Unit KK). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

### **3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik**

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (65 Juta Hektar), Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.800 Entitas), Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1.000 Entitas), Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (1 Sistem), dan Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (5 Unit). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

### **4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi**

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Jumlah destinasi wisata alam prioritas (15 Destinasi), Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (100 Entitas), Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* (7 Destinasi), Jumlah destinasi wisata alam bahari (3 Destinasi). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

### **5. Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial**

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial dengan sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi, dan terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

### **6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat

Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut memiliki indikator Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, dan Level Maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4. Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 6.** Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE					
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (Poin)	78	80	PB	Setditjen KSDAE
2.	Level Maturitas SPIP(Level)	3	4	PB	Setditjen KSDAE
3.	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK (Opini WTP)	1	1	PB	Setditjen KSDAE

**Tabel 7.** Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi					
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Hektar)	7.663.359	27.053.946	PN 1 dan PN 2	Direktorat PIKA
2.	Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	PN 6	Direktorat PIKA
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas					
3.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)	30	150	PN 1	Direktorat PIKA
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru					
4.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	500	2.500	PN 1	Direktorat KK

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
5.	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Hektar)	50.000	400.000	PN 1	Direktorat KK
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati					
6.	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (Hektar)	1.298.500	495.000	PN 6 dan PN 2	Direktorat KK
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi					
7.	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (unit KK)	132	277	PN 1	Direktorat KK
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi					
8.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	15,6	70	PN 6	Direktorat KKH
9.	Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit)	5	5	PN 6	Direktorat KKH
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan					
10.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	1.800	1.800	PN 1	Direktorat KKH
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan dan Satwa Liar secara lestari					
11.	Jumlah entitas perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)	1.000	1.000	PN 6	Direktorat KKH
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan					
12.	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	PN 6	Direktorat KKH
Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan					
13.	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15	15	PN 1	Direktorat PJLHK
14.	Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Estitas)	10	100	PN 1	Direktorat PJLHK
15.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (Destinasi)	7	7	PN 1	Direktorat PJLHK
16.	Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	3	3	PN 1	Direktorat PJLHK

**Tabel 8.** Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi					
1.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	8	43	PN 1	Direktorat BPEE
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif					
2.	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11	55	PN 6	Direktorat BPEE



Jurang Jero

Lokasi:  
Taman Nasional  
Gunung Merapi



Elang Flores  
*Nisaetus floris*

Dokumentasi:  
Teguh Rianto

Lokasi:  
Taman Nasional  
Gunung Rinjani



Elang Jawa  
*Nisaetus bartelsi*

Dokumentasi:  
Wardi

Lokasi:  
TN Gunung Halimun Salak

## BAB LIMA

# Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

67

### 5.1. PETA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN (*CASCADING*)

Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) secara umum ditampilkan pada lampiran 1 sesuai dengan Redesign Sistem Program dan Penganggaran.

Rencana  
Strategis  
2020  
2024

DIREKTORAT  
JENDERAL  
KONSERVASI  
SUMBERDAYA  
ALAM DAN  
EKOSISTEM

## 5.2. TARGET KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dijelaskan bahwa 4 (empat) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh 6 (enam) sasaran program Ditjen KSDAE. Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu:

1. Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL
3. Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL Secara Lestari

4. Meningkatnya Ruang Usaha Bagi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi
5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi; dan
6. Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik di Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Indikator Kinerja Program (IKP) dari sasaran strategis tersebut diuraikan pada tabel 9.

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Program tersebut oleh didukung 6 (enam) kegiatan di tingkat eselon II dan dilaksanakan oleh 74 satker daerah dan 1 satker pusat. Masing-masing kegiatan

**Tabel 9.** IKP dan Target Kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 sesuai dengan Redesign Sistem Program dan Penganggaran.

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (poin)	78	78,5	79	79,5	80
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>						
1.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati (juta hektar)	15,6	29,4	39,7	51,8	70
2.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran (Triliun Rupiah)	2	4.05	6.15	8.3	10.5
3.	Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (Milyar Rupiah)	200	410	630	860	1.100
4.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	500	1.500	2.500	3.500	4.500
5.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi (poin)	52,5	55	57,5	60	62,5
<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>						
1.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)	8	18	28	38	43



Burung Cenderawasih Merah  
*Paradisaea rubra*

Dokumentasi:  
Gusta F.A

Lokasi:  
CA Waigeo Barat



mempunyai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, yang dijabarkan melalui Output (keluaran) pada rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan

konservasi serta terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 10.

### 2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan *opened area* untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 11.

**Tabel 10.** Indikator Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	7,66	11,51	15,55	21,11	27,05
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	1	1	1	1

**Tabel 11.** Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)	500	1.000	1.500	2.000	2.500
2.	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Ribuan Hektar)	50	140	230	320	400
3.	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani (Ribuan Hektar)	1.298,5	541	526	511	495
4.	Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (unit KK)	132	277	277	277	277

### 3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan

konservasi kehati yang berkelanjutan. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 12.

### 4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 13.

**Tabel 12.** Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)	15,6	29,4	39,7	51,8	70
2.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Sistem)	1	1	1	1	1
5.	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (Unit)	1	2	3	4	5

**Tabel 13.** Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	15	15	15	15	15
2.	Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Entitas)	10	35	60	80	100
3.	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> (Destinasi)	7	7	7	7	7
4.	Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	3	3	3	3	3





## 5. Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial dengan sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi, dan terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 14.

## 6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel 15. Indikator ini mendukung IKP dan IKU untuk sasaran Layanan Dukungan Manajemen baik dari Nilai Kinerja Birokrasi, Opini WTP Laporan Keuangan dan Level

**Tabel 14.** Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi (Juta Hektar)	8	18	28	38	43
2.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (Unit KEE)	11	22	33	44	55

**Tabel 15.** Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kumulatif				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin)	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0
2.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	1	1	1	1	1
3.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	4	4

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Baseline yang ditentukan biasanya T-1 dari target yang akan dicapai. Contoh target Nilai Sakip atau Kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah 78, maka baseline yang digunakan adalah tahun 2018 yaitu sebesar 78,4.

Kinerja Kegiatan pada 6 (enam) Kegiatan tersebut sudah selaras dalam pencapaian sasaran kegiatan, sasaran program pada Rencana Strategis Ditjen KSDAE, maupun sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian LHK.

### 5.3. KERANGKA PENDANAAN

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.11.417.266.229.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur

(layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.642.101.000.000,- sudah termasuk dengan memperhitungkan kenaikan tunjangan kinerja. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 17.059.367.229.000,-.

Pendanaan tersebut bisa didapatkan dari sumber APBN, Mitra dan Hibah langsung lainnya yang tidak tercatat di APBN dan dapat dihitung. Kami mencoba untuk menghitung besaran kontribusi pendanaan yang dihasilkan dari seluruh kerja sama di bidang KSDAE. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif adalah sebagai berikut:

**Tabel 16.** Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Belanja (dalam jutaan rupiah)

TAHUN	BELANJA PEGAWAI DAN OPERASIONAL	BELANJA KEGIATAN	TOTAL
2020	1.041.685.000	1.890.709.859	2.932.394.859
2021	1.083.352.000	2.102.912.026	3.186.264.026
2022	1.126.686.000	2.281.411.528	3.408.097.528
2023	1.171.754.000	2.478.603.520	3.650.357.520
2024	1.218.624.000	2.663.629.296	3.882.253.296
<b>TOTAL</b>	<b>5.642.101.000</b>	<b>11.417.266.229</b>	<b>17.059.367.229</b>

**Tabel 17.** Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE per Jenis Kegiatan (dalam ribuan rupiah)

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
5419-Dukungan Manajemen	1.084.861.940	1.161.961.940	1.239.061.940	1.316.161.940	1.393.261.940
5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	63.846.834	73.066.000	82.882.000	94.211.740	106.980.740
5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi	890.009.591	1.022.044.591	1.143.644.591	1.275.444.591	1.395.209.591
5422-Konservasi Spesies dan Genetik	191.250.000	199.625.000	208.000.000	216.375.000	224.750.000
5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	619.926.494	630.806.495	641.988.997	654.384.249	667.011.025
5424-Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	82.500.000	98.760.000	92.520.000	93.780.000	95.040.000
<b>Total Ditjen KSDAE</b>	<b>2.932.394.859</b>	<b>3.186.264.026</b>	<b>3.408.097.528</b>	<b>3.650.357.520</b>	<b>3.882.253.296</b>



Banteng  
*Bos javanicus*

Dokumentasi:  
Gendut Hariyanto

Lokasi:  
TN Alas Purwo

## BAB ENAM

# Penutup

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah melindungi potensi sumber daya alam pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik, dan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam dan ekosistem, khususnya bagi

masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen KSDAE adalah menjadikan potensi sumber daya alam dan ekosistem sebagai modal pembangunan dalam mendukung program pemerintah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 ini telah dirumuskan langkah-langkah sistematis dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dengan Renstra KLHK 2020-2024. Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE di seluruh Indonesia. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE ini diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE untuk berupaya mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumber daya alam hayati.

Untuk di ketahui bersama bahwa tantangan dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati agar tidak punah, namun sekaligus dapat memberikan manfaatnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Tantangan tersebut harus dijawab oleh seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE beserta mitra kerja.

Pada akhirnya, kami memohon rahmat Tuhan YME, semoga seluruh rencana dan upaya dalam pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, serta dapat direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.



Jalak Bali

Dokumentasi:  
Agus Ngurah Krisna

Lokasi:  
Taman Nasional  
Bali Barat



Tupai Vampir  
*Rheithrosciurus macrotis*

Dokumentasi:  
Kamera Trap Stasiun Riset  
Cabang Panti BTN Gunung  
Palung

Lokasi:  
TN Gunung Palung



LAM  
PIRAN

# Lampiran Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024

78

Rencana  
Strategis  
2020  
2024

DIREKTORAT  
JENDERAL  
KONSERVASI  
SUMBERDAYA  
ALAM DAN  
EKOSISTEM

Hiu Paus  
*Rhincodon typus*

Dokumentasi:  
Agustinus Mirino

Lokasi:  
TN Teluk Cendrawasih

LAMPIRAN 1

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Target s.d. 2024	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target s.d. 2024	Ket.
<b>SS1 TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG BERKUALITAS SERTA TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM</b>									
	Luas Kawasan dengan Nilai HCV Tinggi	70 Juta Hektar	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	70 Juta Hektar	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	27 Juta Ha	
							Jumlah mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	1 Mekanisme	
						Konservasi Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif didalam dan diluar kawasan konservasi	70 Juta Ha	
			Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun	5 Unit					
			Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	1,8 Juta Ha				
				Kualitas Lingkungan Hidup	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	43 Juta Hektar	Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43 Juta Ha
Jumlah unit Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	55 Unit KEE								
<b>SS2 TERCAPAINYA OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN</b>									
	Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL & Bioprospecting	128,28 Triliun	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 Triliun	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1.800 Unit	
							Peningkatan Nilai PNBP Sektor LHK	5,5 Triliun	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
	Jumlah destinasi wisata alam bahari	3 Destinasi							
	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	15 Destinasi							
	Jumlah entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	100 Entitas							
	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	1.000 Unit						
<b>SS3 TERJAGAINYA KEBERADAAN, FUNGSI DAN DISTRIBUSI HUTAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</b>									
	Luas Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	4 juta Ha	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan	4.500 Desa	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	2.500 Desa	
							Luas pemberian akses pemanfaatan	400.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Target s.d. 2024	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target s.d. 2024	Ket.
				Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif			tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Hektar	
<b>SS4 TERSELENGGARANYA TATA KELOLA DAN INOVASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG ADAPTIF</b>									
	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dan Perairan	2,5 poin	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi	62,5 poin	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Jumlah Unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	150 Unit KK	
						Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	554 unit KK	
						Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	1 Mekanisme	
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Kementerian LHK	85 poin	Dukungan Manajemen	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya lingkup Ditjen KSDAE	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin	
							Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	1 Opini WTP	
							Level Maturitas SPIP	Level 4 SPIP	

LAMPIRAN 2

**Matriks Target Kinerja dan Standar Komponen  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
Tahun 2020-2024**

Kode KRISNA	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja Kumulatif/Alokasi Anggaran					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>029.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>1.084.862</b>	<b>1.161.962</b>	<b>1.239.062</b>	<b>1.316.162</b>	<b>1.393.262</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
WA.01	Sasaran Program 6 : Meningkatnya Tata Kelola yang Baik di Lingkup Ditjen KSDAE							
01.10	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	Poin	78	78,5	79	79,5	80	
<b>5419</b>	<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem</b>		<b>1.084.862</b>	<b>1.161.962</b>	<b>1.239.062</b>	<b>1.316.162</b>	<b>1.393.262</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
5419.01	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE							
01.01	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	Poin	78	78,5	79	79,5	80	a. Penyusunan Program dan Anggaran b. Evaluasi dan Pelaporan Data, Sistem Informasi dan Kehumasan d. Hukum dan Kerjasama Teknik e. Pengelolaan Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional f. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi g. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan h. Pelayanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan <i>(termasuk Dukman Eselon II dan UPT)</i>
01.02	2. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	4	
01.03	3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Opini WTP	1	1	1	1	1	
<b>029.FF</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>		<b>1.765.033</b>	<b>1.925.542</b>	<b>2.076.516</b>	<b>2.240.416</b>	<b>2.393.951</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
FF.12	Sasaran Program 1 : Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati							
12.01	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Hektar	15,6 Juta	29,4 Juta	39,7 Juta	51,8 Juta	70 Juta	
FF.13	Sasaran Program 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL							
13.01	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Rupiah	2 T	4.05 T	6.15 T	8.30 T	10.50 T	
FF.14	Sasaran Program 3 : Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari							

Kode KRISNA	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja Kumulatif/Alokasi Anggaran					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
14.01	Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Rupiah	200 M	410 M	630 M	860 M	1.100 M	
FF.15	Sasaran Program 4 : Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi							
15.01	Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Desa	500	1.500	2.500	3.500	4.500	
FF.16	Sasaran Program 5 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi							
16.01	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 Juta Ha Kawasan Konservasi	Poin	52,5	55	57,5	60	62,5	
<b>5420</b>	<b>Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>		<b>63.847</b>	<b>73.066</b>	<b>82.882</b>	<b>94.212</b>	<b>106.981</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
5420.01	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi							
01.01	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	Hektar	7.663.359	11.514.563	15.555.110	21.108.767	27.053.946	a. Desain Inventarisasi Kehati Nasional b. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK c. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan d. Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi
01.02	2. Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	Mekanisme	1	1	1	1	1	a. Operasional sistem <i>clearing house</i> kehati b. Koordinasi dan konsultasi multipihak
5420.02	Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas							
02.03	3. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	30	60	90	120	150	a. Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi b. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi Kerjasama c. Penyelenggaraan Kawasan Konservasi

Kode KRISNA	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja Kumulatif/Alokasi Anggaran					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
5421	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>		<b>890.010</b>	<b>1.022.045</b>	<b>1.143.645</b>	<b>1.275.445</b>	<b>1.395.210</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
5421.01	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi							
01.01	1. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	500	1.000	1.500	2.000	2.500	a. Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK b. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK
01.04	2. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Hektar	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000	a. Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi b. Pemberian akses kelola kepada masyarakat
5421.02	Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati							
02.02	3. Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Hektar	1.298.500	541.000	526.000	511.000	495.000	a. Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi b. Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa
5421.03	Sasaran Kegiatan 3: Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi							
03.03	4. Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengolaannya	Unit KK	132	277	277	277	277	a. Perencanaan kelola Kawasan Konservasi b. Penilaian efektivitas kawasan konservasi c. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi d. Pengendalian Kebakaran Hutan
5422	<b>Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik</b>		<b>191.250</b>	<b>199.625</b>	<b>208.000</b>	<b>216.375</b>	<b>224.750</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
5422.01	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan kehati di dalam dan di luar kawasan konservasi							
01.01	1. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam dan diluar kawasan konservasi	Juta Hektar	15,6	29,4	39,7	51,8	70	a. Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi b. Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konsevasi c. Penanganan Satwa Transit

Kode KRISNA	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja Kumulatif/Alokasi Anggaran					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
								d. dan Konflik d. Pengelolaan Zoonosis dan IA
01.05	2. Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun	Unit	1	2	3	4	5	a. Perencanaan dan Penilaian b. Pembangunan Pusat Penanganan Satwa Transit/Konflik
5422.02	Sasaran Kegiatan 2: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan							
02.02	3. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	a. Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran b. Pengembangan jenis bioprospecting c. Rekomendasi Pemanfaatan Bioprospecting d. Data dan Informasi Pemafaatan Kehati
5422.03	Sasaran Kegiatan 3: Terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari							
03.03	4. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Perlindungan Kehati a. Data dan Informasi Perlindungan Kehati b. Penanganan Satwa Transit dan Konflik c. Pengembangan dan Operasional Komisi Keamanan Hayati d. Monitoring dan Evaluasi Pemafaatan Kehati a. Kerjasama Internasional dan Kemitraan b. Rekomendasi Kajian Keamanan Lingkungan terhadap Produk Rekayasa Genetik c. Penilaian Kelayakan Penangkaran d. Penilaian Kelayakan Lembaga Konservasi e. Evaluasi Kelayakan Izin Edar Luar Negeri

Kode KRISNA	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja Kumulatif/Alokasi Anggaran					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
5422.04	Sasaran Kegiatan 4: Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan							
04.04	5. Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	Mekanisme	1	1	1	1	1	a. Mekanisme Pendanaan Pemanfaatan Kehati untuk Pengelolaan Konservasi b. Rekomendasi sistem pendanaan
<b>5423</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Kawasan Konservasi</b>		<b>619.926</b>	<b>630.806</b>	<b>641.989</b>	<b>654.384</b>	<b>667.011</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
5423.01	Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan							
01.01	1. Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Destinasi	15	15	15	15	15	a. Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi b. Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat c. Pemberdayaan Desa Wisata Penyangga Kawasan Konservasi d. Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam e. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam
01.02	2. Jumlah unit pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam	Entitas	15	35	60	80	100	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/Energi Air b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon
01,03	3. Jumlah destinasi wisata alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education (SAVE)</i>	Destinasi	7	7	7	7	7	a. Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis SAVE b. Pengembangan Ecoedutourism c. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE
01.04	4. Jumlah destinasi wisata alam bahari	Destinasi	3	3	3	3	3	a. Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi b. Peningkatan Pengelolaan

Kode KRISNA	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/IKK	Satuan	Target Kinerja Kumulatif/Alokasi Anggaran					Komponen
			2020	2021	2022	2023	2024	
								Jasa Wisata Bahari berbasis masyarakat c. Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Bahari d. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Bahari
<b>029.FD</b>	<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>82.500</b>	<b>98.760</b>	<b>92.520</b>	<b>93.780</b>	<b>95.040</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
FD.15	Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi							
15.01	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	Hektar	8 Juta	18 Juta	28 Juta	38 Juta	43 Juta	
<b>5424</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial</b>		<b>82.500</b>	<b>98.760</b>	<b>92.520</b>	<b>93.780</b>	<b>95.040</b>	Alokasi (dalam juta rupiah)
5424.01	Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi							
01.01	1. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	8	18	28	38	43	a. Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati b. Registrasi Ekosistem Esensial
5424.02	Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif							
02.02	2. Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KEE	11	22	33	44	55	a. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem Esensial b. Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati c. Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT

LAMPIRAN 3

Lokasi Target Kinerja Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 – berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA										
		2020	2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	Satker Pusat dan Seluruh UPT (74 Satker)									
	b.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Satker Pusat dan Seluruh UPT (74 Satker)									
	c.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Satker Pusat dan Seluruh UPT (74 Satker)									
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	a.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif didalam Kawasan Konservasi (Hektar)	1	CA Pananjung Pangandaran	1	KSA/KPA Gunung Kijang	1	CA Durian Luncuk I	1	TWA Gunung Pancar	1	SM Cikepuh
			2	CA Janggangan Rogojampi I	2	KSA/KPA Gunung Lengkuas	2	CA Durian Luncuk II	2	TWA Gunung Papandayan	2	SM Gunung Sawal
			3	SM Dataran Tinggi Yang	3	KSA/KPA Sungai Pulai	3	CA Hutan Bakau Pantai Timur	3	TWA Gunung Tampomas	3	SM Sindangkerta
			4	CA Gunung Mutis	4	CA Kawah Kamojang	4	CA Bojong Larang Jayanti	4	TWA Jember	4	TB Masigit Kareumbi
			5	CA Pegunungan Wayland	5	TWA Cimanggu	5	CA Cigenteng Cipanyi	5	TWA Kamojang	5	TB Pulau Moyo
			6	SM Memberamo	6	TWA Rumpin	6	CA Dungus Iwul	6	TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu	6	CA Wae Wuul
			7	SM Pegunungan Jayawijaya	7	CA Cadas Malang	7	CA Gunung Burangrang	7	TWA Linggarjati	7	CA Watu Ata
			8	TB Komara	8	CA Cibanteng	8	CA Gunung Jagat	8	TWA Pananjung Pangandaran	8	CA Wolo Tado
			9	CA Danau Menghijau	9	CA Malabar	9	CA Gunung Papandayan	9	TWA Pulau Sangiang	9	SM Ale Aisio
			10	TWA air Rami I/II	10	CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	10	CA Gunung Simpang	10	TWA Sukawayana	10	SM Danau Tuadale
			11	TWA Angkek Kapuk	11	TWA Tretes	11	CA Gunung Tangkuban Perahu	11	TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	11	SM Egon Ilmedo
			12	CA Toffo Kota Lambu	12	KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG II)	12	CA Gunung Tilu	12	TWA Manipo	12	SM Harlu
			13	TWA Danau Rawa Taliwang	13	KSA/KPA EX PLG IV	13	CA Gunung Tukung Gede	13	TWA Pulau Batang	13	SM Kateri
			14	TWA Batu Angus	14	CA Riung	14	CA Junghuhn	14	TWA Pulau Lapang	14	CA Waigeo Barat

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	TWA Batu Putih	15	SM Perhatu	15	CA Leuweung Sancang	15	TWA Pulau Rusa	15	CA Waigeo Timur
		16	SM Tanjung Batikolo	16	CA Ndeti Kelikima	16	CA Nusa Gede Panjalu	16	TWA Ruteng	16	SM Muhrani - Kaironi
		17	TN Baluran	17	CA Pedauh	17	CA Pulau Dua	17	CA Hutan Bakau Maubesi	17	SM Sidei Wibain
		18	TN Betung Kerihun	18	TWA Baumata	18	CA Rawa Danau	18	CA Kemang Boleng I	18	SM Balai Raja
		19	TN Bukit Baka Bukit Raya	19	TWA Bipolo	19	CA Sukawayana	19	CA Kemang Boleng II	19	SM Bukit Batu
		20	TN Bukit Tiga Puluh	20	TWA Camplong	20	CA Takokak	20	TWA Nabire	20	SM Bukit Rimbang Bukit Baling
		21	TN Gunung Ciremai	21	TWA Tujuh Belas Pulau	21	CA Talaga Bodas	21	TWA Teluk Youtefa	21	SM Giam Siak Kecil
		22	TN Kayan Mentarang	22	TWA Tuti Adagae	22	CA Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	22	CA Pegunungan Cycloops	22	SM Kerumutan
		23	TN Kepulauan Togean	23	CA Biak Utara	23	CA Telaga Patengan	23	CA Pulau Supiori	23	SM PLG Sebang
		24	TN Gunung Merbabu	24	CA Bupul	24	CA Telaga Warna	24	CA Tanjung Wiay	24	SM Tasik Belat
		25	TN Meru Betiri	25	CA Enarotali	25	CA Yanlapa	25	TWA Gunung Meja	25	SM Tasik Besar (Serkap)
		26	TN Rawa Aopa Watumohai	26	KSA/KPA Mapia	26	TWA Gunung Guntur	26	TWA Klamono	26	SM Tasik Serkap (Tasik Sarang Burung)
		27	TN Gunung Rinjani	27	SM Danau Bian	27	TWA Talaga Bodas	27	TWA Sorong	27	SM Tasik Tanjung Padang
		28	TN Siberut	28	SM Pulau Dolok	28	TWA Telaga Patengan	28	CA Pegunungan Arfak	28	TB Pulau Rempang
		29	TN Gunung Tambora	29	SM Pulau Komolon	29	TWA Telaga Warna	29	CA Pegunungan Fakfak	29	TN Zamrud
		30	TN Teluk Cenderawasih	30	SM Pulau Pombo	30	CA Besowo Gadungan	30	CA Pulau Batanta Barat	30	SM Barumun
		31	TN Ujung Kulon	31	SM Savan	31	CA Ceding	31	CA Pulau Misool	31	SM Dolok Surungan
				32	CA Yapen Tengah	32	CA Curah Manis Sempolan I-VII	32	CA Pulau Salawati Utara	32	SM Karang Gading Langkat Timur Laut
				33	CA Pantai Sausafor	33	CA Gua Nglirip	33	TWA Muka Kuning	33	SM Siranggas
				34	CA Pegunungan Kumawa	34	CA Gunung Abang	34	TWA Sungai Dumai	34	TB Pulau Pini

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA								
		2020		2021		2022		2023		2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			35	CA Pegunungan Tamrau Selatan	35	CA Gunung Picis	35	CA Bukit Bungkok	35	SM Rawa Singkil
			36	CA Pegunungan Tamrau Utara	36	CA Gunung Sigogor	36	CA Pulau Berkeh	36	TB Lingga Isaq
			37	CA Pegunungan Wondiboy	37	CA Janggangan Rogojampi II	37	TWA Lejja	37	TB Gunung Nanu'ua
			38	CA Pulau Kofiau	38	CA Manggis Gadungan	38	TWA Malino	38	SM Paliyan
			39	CA Teluk Bintuni	39	CA Pancur Ijen I	39	CA Faruhumpenai	39	SM Sermo
			40	CA Wagura Kote	40	CA Pancur Ijen II	40	CA Kalaena	40	SM Muara Angke
			41	KSA/KPA Hutan Pendidikan Tuan Wowi	41	CA Pulau Bawean	41	CA Ponda-ponda	41	SM Pulau Rambut
			42	SM Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	42	CA Pulau Noko	42	TWA Holiday Resort	42	SM Gunung Tunggangan
			43	SM Pulau Venu	43	CA Pulau Nusa	43	CA Batu Gajah	43	SM Pulau Bawean
			44	TWA Beriat	44	CA Pulau Sempu	44	CA Batu Ginurit	44	SM Pulau Nusa Barung
			45	KSA/KPA Mahato	45	CA Saobi	45	CA Dolok Saut	45	SM Pulau Semama
			46	TWA Buluh Cina	46	CA Sungai Kolbu Iyang Plateau	46	CA Dolok Sibual-Buali	46	CA Teluk Pamukan
			47	TWA Cani Sirenreng	47	CA Watangan Puger	47	CA Dolok Sipirok	47	SM Kuala Lupak
			48	TWA Danau Mahalona	48	TWA Gunung Baung	48	CA Dolok Tinggi Raja	48	SM Pleihari Tanah Laut
			49	TWA Danau Matano	49	TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	49	CA Liang Balik	49	SM Pulau Kaget
			50	TWA Nanggala III	50	TWA Teluk Kupang	50	CA Lubuk Raya	50	SM Lamandau
			51	TWA Sidrap	51	TWA Supiori	51	CA Martelu Purba	51	SM Pulau Kasa
			52	KSA/KPA Calon Tahura Mesawa	52	TWA Danau Towuti	52	CA Sibolangit	52	SM Tanimbar
			53	KSA/KPA Sei Ledong	53	TWA Deleng Lancuk	53	TWA Lau Debuk-debuk	53	TB Dataran Bena
			54	CA Bekau Huhun	54	CA Janthoi	54	TWA Sibolangit	54	TB Pulau Ndana
			55	CA Pulau Obi	55	CA Batukahu I-	55	TWA Sicike-cike	55	TN Gandang

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA							
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7			
				III		Dewata			
		56	CA Serbojadi	56	TWA Gunung Batur Bukit Payang	56	TWA Sijaba Huta Ginjang	56	SM Bakiriang
		57	TWA Kuta Malaka	57	CA Air Alas	57	TWA Jhanto	57	SM Lombuyan
		58	TWA Danau Buyan - Danau Tamblingan	58	CA Danau Dusun Besar	58	TWA Kepulauan Banyak	58	SM Pati-pati
		59	KSA/KPA Daab	59	CA Kioyo I dan II	59	TWA Pulau Weh	59	SM Pinjan/Tanjung Matop
		60	KSA/KPA Danau Tihu	60	CA Muko-muko	60	TWA Panelokan	60	SM Pulau Dolangan
		61	KSA/KPA Gunung Sahuwai	61	CA Pagar Gunung I	61	TWA Sangeh	61	SM Tanjung Santigi
		62	KSA/KPA Pulau Larat	62	CA Pagar Gunung II	62	TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	62	TB Landusa Tomata
		63	KSA/KPA Rawa Kandis	63	CA Pagar Gunung III	63	CA Bukit Barisan Selatan	63	SM Buton Utara
		64	KSA/KPA Sungai Niff	64	CA Pagar Gunung IV	64	TWA Gunung Selok	64	SM Lambusango
		65	KSA/KPA Tafermaar	65	CA Pagar Gunung V	65	TWA Sumber Semen	65	SM Tanjung Amolengo
		66	TWA Air Hitam	66	CA Pasar Ngalam	66	TWA Pulau Sangalaki	66	SM Tanjung Peropa
		67	TWA Air Ketebat Danau Tes	67	CA Pasar Seluma	67	TWA Gunung Melintang	67	SM Gunung Manembo-nembo
		68	TWA Bukit Kaba	68	CA Pasar Talo	68	CA Muara Kendawangan	68	SM Karakelang
		69	TWA Danau Dusun Besar	69	CA Sungai Bahewo	69	CA Nyiut Penrissen	69	SM Nantu
		70	TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran	70	CA Taba Penanjung I	70	TWA Pleihari Tanah Laut	70	SM Arau Hilir dan Air Tarusan
		71	TWA Muko-muko	71	CA Taba Penanjung II	71	TWA Pulau Bakut	71	SM Barisan
		72	TWA Seblat	72	CA Talang Ulu I	72	TWA Pulau Kembang	72	SM Malampah Alahan Panjang
		73	TWA Way Hawang	73	CA Talang Ulu II	73	CA Gunung Kentawan	73	SM Bentayan
		74	CA Air Seblat	74	CA Tanjung	74	CA Sungai	74	SM Dangku

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA								
		2020		2021		2022		2023		2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Laksaha		Bulan dan Sungai Lulan			
			75	CA kepulauan Krakatau	75	CA Teluk Klowe	75	CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	75	SM Gunung Raya
			76	TB Semidang Bukit Kabu	76	CA Gunung Batu Gamping	76	CA Bukit Sapat Hawung	76	SM Isau-isau Pasemah
			77	KSA/KPA Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	77	CA Imogiri	77	CA Bukit Tangkiling	77	SM Padang Sugihan
			78	KSA/KPA Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	78	TWA Gunung Batu Gamping	78	TWA Pulau Kasa	78	TN Gunung Maras
			79	CA Sungai Batara	79	CA Pulau Bokor	79	TWA Pulau Marsegu	79	SM Komara
			80	CA Karimata	80	CA Bantarbolang	80	TWA Pulau Pombo	80	TN Alas Purwo
			81	CA Lo Pat Foen Pi	81	CA Bekutuk	81	CA Gunung Api Kisar	81	TN Bali Barat
			82	CA Mandor	82	CA Cabak	82	CA Pombo	82	TN Bantimurung-Bulusaraung
			83	TWA Asuansang	83	CA Curug Bengkawah	83	CA Pulau Angwarmase	83	TN Batang Gadis
			84	TWA Baning	84	CA Donoloyo	84	CA Pulau Nustaram	84	TN Berbak
			85	TWA Bukit Kelam	85	CA Gebugan	85	CA Pulau Nuswotar	85	TN Sembilang
			86	KSA/KPA Asam-asam	86	CA Gunung Butak	86	CA Tanjung Sial	86	TN Danau Sentarum
			87	KSA/KPA Marang (Eks PLG I)	87	CA Gunung Celering	87	CA Gunung Sibela Pulau Bacan	87	TN Bogani Nani Wartabone
			88	KSA/KPA Sei Sebangau	88	CA Jatinegara	88	CA Lifamatola	88	TN Bromo Tengger Semeru
			89	KSA/KPA Sungai Barito	89	CA Karang Bolong	89	CA Pulau Seho	89	TN Bukit Barisan Selatan
			90	KSA/KPA Sungai Kapuas	90	CA Kecubung Ulo Lanang	90	TWA Gunung Tunak	90	TN Bukit Dua Belas
			91	KSA/KPA Tanjung	91	CA Keling I	91	TWA Kerandangan	91	TN Bunaken

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA								
		2020		2021		2022		2023		2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Malatayur							
		92	KSA/KPA Tanjung Pengharapan - Sungai Embung	92	CA Keling II/III	92	TWA Madapangga	92	TN Gunung Gede Pangrango	
		93	CA Pararawen I dan II	93	CA Kembang	93	TWA Pelangan	93	TN Gunung Halimun Salak	
		94	TWA Bukit Tangkiling	94	CA Moga	94	TWA Pulau Moyo	94	TN Gunung Leuser	
		95	CA Taliabu	95	CA Nusakambangan Barat	95	TWA Pulau Satonda	95	TN Gunung Merapi	
		96	CA Tobalai	96	CA Nusakambangan Timur	96	TWA Semongkat	96	TN Gunung Palung	
		97	SM Masbait	97	CA Pager Wunung Darupono	97	CA Pulau Sangiang	97	TN Karimunjawa	
		98	SM Pulau Baun	98	CA Pantodomas	98	TWA Pulau Pasoso	98	TN Kelimutu	
		99	SM Pulau Kobror	99	CA Peson Subah I	99	TWA Pulau Tokobae	99	TN Kepulauan Seribu	
		100	SM Pulau Manuk	100	CA Peson Subah II	100	CA Gunung Dako	100	TN Kerinci Seblat	
		101	KSA/KPA Danuera	101	CA Pringombo I	101	CA Gunung Sojol	101	TN Komodo	
		102	KSA/KPA Jereweh	102	CA Pringombo II	102	CA Gunung Tinombala	102	TN Kutai	
		103	KSA/KPA Pulau Panjang	103	CA Sepakung	103	CA Morowali	103	TN Lore Lindu	
		104	KSA/KPA Sisimeni Sanam	104	CA Telogo Dringo	104	CA Pamona	104	TN Lorentz	
		105	TWA Bangko Bangko	105	CA Telogo Ranjeng	105	CA Pangi Binangga	105	TN Manusela	
		106	TWA Bancea	106	CA Telogo Sumurup	106	CA Tanjung Api	106	TN Laiwangi Wanggameti	
		107	TWA Wera	107	CA Wijaya Kusuma	107	TWA Kepulauan Padamarang	107	TN Manupeu Tanah Daru	
		108	TWA Tirta Rimba / Air Jatuh	108	TWA Grojogan Sewu	108	TWA Mangolo	108	TN Meru Betiri	
		109	CA Tangale	109	TWA Guci	109	CA Kakenauwe	109	TN Sebangau	
		110	CA Lembah	110	TWA Telogo	110	CA Lamedae	110	TN Taka	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA											
		2020		2021		2022		2023		2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			0	Anai	0	Warno / Telogo Pengilon	0		0	Bonerate			
		11	1	CA Rimbo Panti	11	1	CA Muara Kaman Sedulang	11	1	CA Napabalano	11	1	TN Tanjung Puting
		11	2	SM Pagai Selatan	11	2	CA Padang Luwai	11	2	CA Gunung Ambang	11	2	TN Tesso Nilo
		11	3	TWA Air Putih Kelok 9	11	3	CA Teluk Adang	11	3	CA Gunung Dua Sudara	11	3	TN Wakatobi
		11	4	SM Gumai Pasemah	11	4	CA Teluk Apar	11	4	CA Gunung Lokon	11	4	TN Wasur
		11	5	TWA Bukit Serelo (eks PLG KH Isau-isau)	11	5	CA Gunung Raya Pasi	11	5	TWA Gunung Marapi	11	5	TN Way Kambas
		11	6	Tahura Subulussalam	11	6	TWA Gunung Dungan / Gunung Batu	11	6	TWA Gunung Sago Malintang	11	6	Tahura Abdul Latief/Sinjai
		11	7	Tahura Sultan Adam	11	7	TWA Sungai Liku	11	7	TWA Lembah Harau	11	7	Tahura Banten
		11	8	Tahura Bukit Sari	11	8	TWA Tanjung Belimbing	11	8	TWA Mega Mendung	11	8	Tahura Bontobahari
		11	9	Tahura Bukit Rabang - Gluguran	11	9	TWA Tanjung Keluang	11	9	TWA Rimbo Panti	11	9	Tahura Bukit Barisan
		12	0	Tahura Gunung Lalang	12	0	TWA Gunung Api Banda	12	0	TWA Saibi Sarabua	12	0	Tahura Bukit Soeharto
		12	1	Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	12	1	TWA Suranadi	12	1	TWA Singgalang Tandikat	12	1	Tahura Dr. Muhammad Hatta
		12	2	Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	12	2	TWA Tanjung Tamba	12	2	CA Baringin Sati	12	2	Tahura Gunung Bunder
					12	3	TWA Teluk Lasolo	12	3	CA Batang Palupuh	12	3	Tahura Gunung Mangkol
					12	4	CA Mas Popaya Raja	12	4	CA Batang Pangean I	12	4	Tahura Gunung Menumbing
					12	5	CA Panua	12	5	CA Batang Pangean II	12	5	Tahura Gunung Tumpa (Haveworang)
					12	6	CA Tanjung Panjang	12	6	CA Lembah Harau	12	6	Tahura Ir. H. Juanda
					12	7	TWA Gunung Ambang	12	7	CA Maninjau	12	7	Tahura KGPAA Mangkunegoro( Ngargoyoso)

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA										
		2020		2021		2022		2023		2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							12	TWA Gunung Permisan	12	Tahura Lapak Jaru		
							12	TWA Jering Menduyung	12	Tahura Lati Petangis		
							13	TWA Punt Kayu	13	Tahura Murhum		
							0		0	Tahura Ngurah Rai		
									13	Tahura Nuraksa		
									13	Tahura Pancoran Mas		
									13	Tahura Pocut Meurah Intan		
									13	Tahura Prof. Ir. Herman Johannes		
									13	Tahura R. Soeryo		
									13	Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)		
									13	Tahura Simeulue		
									13	Tahura Sultan Syarif Kasim (Minas)		
									14	Tahura Sultan Thaha Syaifuddin		
									14	Tahura Sulteng		
									14	Tahura Wan Abdul Rahman		
	b.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	1	CA Mutis	1	SM Perhatu	1	CA Pararawen I dan II	1	CA Bekau Huhun	1	KSA/KPA Asam-asam
			2	TN Baluran	2	SM Tua Dale	2	CA Biak Utara	2	CA Cadas Malang	2	KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG II)
			3	TN Betung Kerihun	3	CA Deta Kilikima	3	CA Bupul	3	CA Cibanteng	3	KSA/KPA Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko
			4	TN Ceremai	4	CA Riung	4	CA Enarotali	4	CA Danau Menghijau	4	KSA/KPA Calon Tahura Mesawa

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		3	4	5	6	7					
1	2	5	TWA Angkek Kapuk	5	CA Wayland	5	CA Pantai Sausafor	5	CA Gunung Mutis	5	KSA/KPA Daab
		6	TNMeru Betiri	6	SM Memberamo	6	CA Pegunungan Kumawa	6	CA Gunung Sibela Pulau Obi	6	KSA/KPA Danau Tihu
		7	TN Rinjani	7	TWA Rumpin	7	CA Pegunungan Tamrau Selatan	7	CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	7	KSA/KPA Danuera
		8	TN Merbabu	8	CA Malabar'	8	CA Pegunungan Tamrau Utara	8	CA Kawah Kamojang	8	KSA/KPA Gunung Kijang
		9	TN Tambora	9	Tahura Bukit Rabang - Gluguran	9	CA Pegunungan Wayland	9	CA kepulauanKraak atau	9	KSA/KPA Gunung Lengkuas
		10	CA Toffo Kota Lambu	10	Tahura Gunung Lalang	10	CA Pegunungan Wondiboy	10	CA Lembah Anai	10	KSA/KPA Gunung Sahuwai
		11	TWA Danau Rawa Taliwang	11	Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	11	CA Pulau Kofiau	11	CA Malabar	11	KSA/KPA Hutan Pendidikan Tuan Wowi
		12	TN Teluk Cendrawasih	12	Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	12	CA Teluk Bintuni	12	CA Ndetta Kelikima	12	KSA/KPA Jereweh
		13	SM Jayawijaya	13	Tahura Subulussalam	13	CA Torobi	13	CA Pedauh	13	KSA/KPA Mahato
		14	CA Wayland	14	Tahura Sultan Adam	14	CA Wagura Kote	14	CA Pulau Obi	14	KSA/KPA Mapia
		15	SM Memberamo	15	CA Danau Menghijau	15	SM Danau Bian	15	CA Rimbo Panti	15	KSA/KPA Marang (Eks PLG I)
		16	TN Bukit Baka Bukit Raya	16	CA kepulauanKraak atau	16	SM Pulau Dolok	16	CA Riung	16	KSA/KPA Pulau Kerasian, Kerayaan dan Kerumpunan
		17	TN Siberut	17	TWA Air Air Rami I/II	17	SM Pulau Komolon	17	CA Sungai Batara	17	KSA/KPA Pulau Larat
		18	TN Bukit Tiga Puluh	18	CA Air Seblat	18	SM Pulau Pombo	18	CA Taliabu	18	KSA/KPA Rawa Kandis
		19	SM Sungai Bengkal	19	CA Danau Dusun Besar	19	SM Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	19	CA Tobalai	19	KSA/KPA Sei Ledong
		20	CA Danau Menghijau	20	TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran	20	SM Pulau Venu	20	CA Toffo Kota Lambu	20	KSA/KPA Sisimeni Sanam
		21	CA Ari Rami	21	TWA Muko-muko	21	SM Savan	21	SM Gumai Pasemah	21	KSA/KPA Sungai Barito

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA											
		2020		2021		2022		2023		2024			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		22	CA Telaga Bodas	22	TWA Seblat	22	TWA Holiday Resort	22	SM Masbait	22	KSA/KPA Sungai Kapuas		
		23	CA Pananjung Pangandaran	23	TWA Way Hawang	23	TWA Nanggala III	23	SM Memberamo Foja	23	KSA/KPA Sungai Niff		
		24	TN Kayan Mentarang	24	CA Serbojadi	24	TWA Sidrap	24	SM Pagai Selatan	24	KSA/KPA Sungai Pulai		
		25	TB Komara	25	CA Tangale	25	TWA Wera	25	SM Pegunungan Jayawijaya	25	KSA/KPA Tabir Kejasung / Sungai Bengkal		
		26	TN Kepulauan Togeang	26	Tahura Bukit Sari	26	SM Pulau Baun	26	SM Perhatu	26	KSA/KPA Tafermaar		
		27	SM Tanjung Batikolo	27	TWA Kuta Malaka	27	SM Pulau Kobror	27	(usulan Revisi Zona/Blok)	27	KSA/KPA Tanjung Malatayur		
		28	TN Rawa Aopa Watumohai	28	CA Karimata	28	SM Pulau Manuk	28	(usulan Revisi Zona/Blok)	28	KSA/KPA Tanjung Pengharapan - Sungai Embung		
		29	TWA Batu Angus	29	CA Lo Pat Foen Pi	29	TB Semidang Bukit Kabu	29	(usulan Revisi Zona/Blok)	29	KSA/KPA Pulau Panjang		
		30	TWA Batu Putih	30	CA Mandor	30	(usulan Revisi Zona/Blok)	30	(usulan Revisi Zona/Blok)	30	(usulan Revisi Zona/Blok)		
		31	SM Dataran Tinggi Yang										
		32	CA Rogojampi										
		33	TN Ujung Kulon										
		c.	Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (Mekanisme)	1	Satker Pusat	1	Satker Pusat	1	Satker Pusat	1	Satker Pusat	1	Satker Pusat
		Pengelolaan Kawasan Konservasi	a.	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1	BBKSDA Jawa Barat (15)	1	BBKSDA Jawa Barat (32)	1	BBKSDA Jawa Barat (52)	1	BBKSDA Jawa Barat (72)	1
2	BBKSDA Nusa Tenggara Timur (5)				2	BBKSDA Nusa Tenggara Timur (15)	2	BBKSDA Nusa Tenggara Timur (30)	2	BBKSDA Nusa Tenggara Timur (45)	2	BBKSDA Nusa Tenggara Timur (55)	
3	BBKSDA Papua (5)				3	BBKSDA Papua (15)	3	BBKSDA Papua (30)	3	BBKSDA Papua (40)	3	BBKSDA Papua (50)	
4	BBKSDA Papua Barat (5)				4	BBKSDA Papua Barat (15)	4	BBKSDA Papua Barat (30)	4	BBKSDA Papua Barat (40)	4	BBKSDA Papua Barat (50)	
5	BBKSDA Riau (5)				5	BBKSDA Riau (15)	5	BBKSDA Riau (30)	5	BBKSDA Riau (50)	5	BBKSDA Riau (70)	
6	BBKSDA Sulawesi Selatan (10)				6	BBKSDA Sulawesi Selatan (30)	6	BBKSDA Sulawesi Selatan (50)	6	BBKSDA Sulawesi Selatan (80)	6	BBKSDA Sulawesi Selatan (100)	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		7	BBKSDA Sumatera Utara (10)	7	BBKSDA Sumatera Utara (25)	7	BBKSDA Sumatera Utara (40)	7	BBKSDA Sumatera Utara (62)	7	BBKSDA Sumatera Utara (87)
		8	BBTN Gunung Gede Pangrango (7)	8	BBTN Gunung Gede Pangrango (17)	8	BBTN Gunung Gede Pangrango (25)	8	BBTN Gunung Gede Pangrango (35)	8	BBTN Gunung Gede Pangrango (45)
		9	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (6)	9	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (11)	9	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (14)	9	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (17)	9	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (20)
		10	BBTN Bromo Tengger Semeru (9)	10	BBTN Bromo Tengger Semeru (19)	10	BBTN Bromo Tengger Semeru (23)	10	BBTN Bromo Tengger Semeru (27)	10	BBTN Bromo Tengger Semeru (32)
		11	BBTN Bukit Barisan Selatan (5)	11	BBTN Bukit Barisan Selatan (15)	11	BBTN Bukit Barisan Selatan (30)	11	BBTN Bukit Barisan Selatan (50)	11	BBTN Bukit Barisan Selatan (70)
		12	BBTN Gunung Leuser (5)	12	BBTN Gunung Leuser (15)	12	BBTN Gunung Leuser (30)	12	BBTN Gunung Leuser (50)	12	BBTN Gunung Leuser (65)
		13	BBTN Kerinci Seblat (13)	13	BBTN Kerinci Seblat (28)	13	BBTN Kerinci Seblat (48)	13	BBTN Kerinci Seblat (73)	13	BBTN Kerinci Seblat (103)
		14	BBTN Lore Lindu (5)	14	BBTN Lore Lindu (15)	14	BBTN Lore Lindu (25)	14	BBTN Lore Lindu (35)	14	BBTN Lore Lindu (40)
		15	BKSDA Aceh (5)	15	BKSDA Aceh (20)	15	BKSDA Aceh (35)	15	BKSDA Aceh (45)	15	BKSDA Aceh (55)
		16	BKSDA Bali (10)	16	BKSDA Bali (13)	16	BKSDA Bali (15)	16	BKSDA Bali (15)	16	BKSDA Bali (15)
		17	BKSDA Bengkulu Lampung (10)	17	BKSDA Bengkulu Lampung (25)	17	BKSDA Bengkulu Lampung (40)	17	BKSDA Bengkulu Lampung (50)	17	BKSDA Bengkulu Lampung (65)
		18	BKSDA DKI Jakarta (4)	18	BKSDA DKI Jakarta (4)	18	BKSDA DKI Jakarta (4)	18	BKSDA DKI Jakarta (4)	18	BKSDA DKI Jakarta (4)
		19	BKSDA Jawa Tengah (5)	19	BKSDA Jawa Tengah (15)	19	BKSDA Jawa Tengah (22)	19	BKSDA Jawa Tengah (30)	19	BKSDA Jawa Tengah (36)
		20	BBKSDA Jawa Timur (5)	20	BBKSDA Jawa Timur (17)	20	BBKSDA Jawa Timur (23)	20	BBKSDA Jawa Timur (31)	20	BBKSDA Jawa Timur (37)
		21	BKSDA Kalimantan Barat (5)	21	BKSDA Kalimantan Barat (10)	21	BKSDA Kalimantan Barat (15)	21	BKSDA Kalimantan Barat (20)	21	BKSDA Kalimantan Barat (25)
		22	BKSDA Kalimantan Selatan (15)	22	BKSDA Kalimantan Selatan (25)	22	BKSDA Kalimantan Selatan (35)	22	BKSDA Kalimantan Selatan (42)	22	BKSDA Kalimantan Selatan (47)
		23	BKSDA Kalimantan Tengah (15)	23	BKSDA Kalimantan Tengah (25)	23	BKSDA Kalimantan Tengah (28)	23	BKSDA Kalimantan Tengah (30)	23	BKSDA Kalimantan Tengah (35)
		24	BKSDA Kalimantan	24	BKSDA Kalimantan	24	BKSDA Kalimantan	24	BKSDA Kalimantan	24	BKSDA Kalimantan

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		3	4	5	6	7					
1	2	Timur (10)	Timur (15)	Timur (20)	Timur (27)	Timur (32)					
		25 BKSDA Maluku (15)	25 BKSDA Maluku (25)	25 BKSDA Maluku (35)	25 BKSDA Maluku (40)	25 BKSDA Maluku (45)					
		26 BKSDA Nusa Tenggara Barat (8)	26 BKSDA Nusa Tenggara Barat (13)	26 BKSDA Nusa Tenggara Barat (17)	26 BKSDA Nusa Tenggara Barat (21)	26 BKSDA Nusa Tenggara Barat (23)					
		27 BKSDA Sulawesi Tengah (20)	27 BKSDA Sulawesi Tengah (35)	27 BKSDA Sulawesi Tengah (49)	27 BKSDA Sulawesi Tengah (59)	27 BKSDA Sulawesi Tengah (64)					
		28 BKSDA Sulawesi Tenggara (20)	28 BKSDA Sulawesi Tenggara (35)	28 BKSDA Sulawesi Tenggara (45)	28 BKSDA Sulawesi Tenggara (54)	28 BKSDA Sulawesi Tenggara (59)					
		29 BKSDA Sulawesi Utara (10)	29 BKSDA Sulawesi Utara (20)	29 BKSDA Sulawesi Utara (24)	29 BKSDA Sulawesi Utara (27)	29 BKSDA Sulawesi Utara (32)					
		30 BKSDA Sumatera Barat (20)	30 BKSDA Sumatera Barat (35)	30 BKSDA Sumatera Barat (55)	30 BKSDA Sumatera Barat (75)	30 BKSDA Sumatera Barat (85)					
		31 BKSDA Sumatera Selatan (20)	31 BKSDA Sumatera Selatan (30)	31 BKSDA Sumatera Selatan (50)	31 BKSDA Sumatera Selatan (75)	31 BKSDA Sumatera Selatan (90)					
		32 BKSDA Yogyakarta (4)	32 BKSDA Yogyakarta (6)	32 BKSDA Yogyakarta (7)	32 BKSDA Yogyakarta (7)	32 BKSDA Yogyakarta (7)					
		33 BKSDA Jambi (3)	33 BKSDA Jambi (4)	33 BKSDA Jambi (5)	33 BKSDA Jambi (6)	33 BKSDA Jambi (6)					
		34 BTN Aketajawe Lolobata (5)	34 BTN Aketajawe Lolobata (11)	34 BTN Aketajawe Lolobata (14)	34 BTN Aketajawe Lolobata (16)	34 BTN Aketajawe Lolobata (21)					
		35 BTN Alas Purwo (5)	35 BTN Alas Purwo (5)	35 BTN Alas Purwo (5)	35 BTN Alas Purwo (5)	35 BTN Alas Purwo (5)					
		36 BTN Bali Barat (6)	36 BTN Bali Barat (6)	36 BTN Bali Barat (6)	36 BTN Bali Barat (6)	36 BTN Bali Barat (6)					
		37 BTN Baluran (2)	37 BTN Baluran (2)	37 BTN Baluran (2)	37 BTN Baluran (2)	37 BTN Baluran (2)					
		38 BTN Bantimurung Bulusaraung (5)	38 BTN Bantimurung Bulusaraung (10)	38 BTN Bantimurung Bulusaraung (13)	38 BTN Bantimurung Bulusaraung (18)	38 BTN Bantimurung Bulusaraung (28)					
		39 BTN Batang Gadis (5)	39 BTN Batang Gadis (15)	39 BTN Batang Gadis (22)	39 BTN Batang Gadis (27)	39 BTN Batang Gadis (32)					
		40 BTN Berbak Sembilang (5)	40 BTN Berbak Sembilang (8)	40 BTN Berbak Sembilang (10)	40 BTN Berbak Sembilang (12)	40 BTN Berbak Sembilang (14)					
		41 BTN Bogani Nani Wartabone (10)	41 BTN Bogani Nani Wartabone (25)	41 BTN Bogani Nani Wartabone (45)	41 BTN Bogani Nani Wartabone (60)	41 BTN Bogani Nani Wartabone (75)					
		42 BTN Bukit Baka-Bukit Raya (2)	42 BTN Bukit Baka-Bukit Raya (7)	42 BTN Bukit Baka-Bukit Raya (10)	42 BTN Bukit Baka-Bukit Raya (12)	42 BTN Bukit Baka-Bukit Raya (15)					
		43 BTN Bukit Duabelas (3)	43 BTN Bukit Duabelas (6)	43 BTN Bukit Duabelas (7)	43 BTN Bukit Duabelas (7)	43 BTN Bukit Duabelas (7)					
		44 BTN Bukit	44 BTN Bukit	44 BTN Bukit	44 BTN Bukit	44 BTN Bukit					

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA								
		2020		2021		2022		2023		2024
		3	4	5	6	7				
1	2									
		Tigapuluh (2)	Tigapuluh (5)	Tigapuluh (7)	Tigapuluh (10)	Tigapuluh (12)				
		45 BTN Bunaken (4)	45 BTN Bunaken (7)	45 BTN Bunaken (9)	45 BTN Bunaken (10)	45 BTN Bunaken (10)				
		46 BTN Gunung Ciremai (5)	46 BTN Gunung Ciremai (15)	46 BTN Gunung Ciremai (25)	46 BTN Gunung Ciremai (30)	46 BTN Gunung Ciremai (35)				
		47 BTN Gunung Halimun Salak (10)	47 BTN Gunung Halimun Salak (25)	47 BTN Gunung Halimun Salak (40)	47 BTN Gunung Halimun Salak (60)	47 BTN Gunung Halimun Salak (85)				
		48 BTN Gunung Merapi (2)	48 BTN Gunung Merapi (7)	48 BTN Gunung Merapi (11)	48 BTN Gunung Merapi (15)	48 BTN Gunung Merapi (20)				
		49 BTN Gunung Merbabu (5)	49 BTN Gunung Merbabu (11)	49 BTN Gunung Merbabu (17)	49 BTN Gunung Merbabu (24)	49 BTN Gunung Merbabu (29)				
		50 BTN Gunung Palung (2)	50 BTN Gunung Palung (5)	50 BTN Gunung Palung (7)	50 BTN Gunung Palung (9)	50 BTN Gunung Palung (12)				
		51 BTN Gunung Rinjani (5)	51 BTN Gunung Rinjani (10)	51 BTN Gunung Rinjani (15)	51 BTN Gunung Rinjani (20)	51 BTN Gunung Rinjani (25)				
		52 BTN Gunung Tambora (4)	52 BTN Gunung Tambora (6)	52 BTN Gunung Tambora (7)	52 BTN Gunung Tambora (8)	52 BTN Gunung Tambora (8)				
		53 BTN Karimunjawa (4)	53 BTN Karimunjawa (4)	53 BTN Karimunjawa (4)	53 BTN Karimunjawa (4)	53 BTN Karimunjawa (4)				
		54 BTN Kayan Mentarang (5)	54 BTN Kayan Mentarang (10)	54 BTN Kayan Mentarang (20)	54 BTN Kayan Mentarang (30)	54 BTN Kayan Mentarang (45)				
		55 BTN Kelimutu (5)	55 BTN Kelimutu (9)	55 BTN Kelimutu (11)	55 BTN Kelimutu (13)	55 BTN Kelimutu (13)				
		56 BTN Kepulauan Seribu (3)	56 BTN Kepulauan Seribu (3)	56 BTN Kepulauan Seribu (3)	56 BTN Kepulauan Seribu (3)	56 BTN Kepulauan Seribu (3)				
		57 BTN Kepulauan Togean (3)	57 BTN Kepulauan Togean (8)	57 BTN Kepulauan Togean (13)	57 BTN Kepulauan Togean (18)	57 BTN Kepulauan Togean (23)				
		58 BTN Komodo (4)	58 BTN Komodo (4)	58 BTN Komodo (4)	58 BTN Komodo (4)	58 BTN Komodo (4)				
		59 BTN Kutai (5)	59 BTN Kutai (8)	59 BTN Kutai (9)	59 BTN Kutai (11)	59 BTN Kutai (13)				
		60 BTN Lorentz (5)	60 BTN Lorentz (10)	60 BTN Lorentz (20)	60 BTN Lorentz (30)	60 BTN Lorentz (40)				
		61 BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (5)	61 BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (10)	61 BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (15)	61 BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (20)	61 BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (25)				
		62 BTN Manusela (5)	62 BTN Manusela (9)	62 BTN Manusela (12)	62 BTN Manusela (15)	62 BTN Manusela (18)				
		63 BTN Meru Betiri (5)	63 BTN Meru Betiri (6)	63 BTN Meru Betiri (7)	63 BTN Meru Betiri (7)	63 BTN Meru Betiri (7)				
		64 BTN Rawa Aopa Watumohai (5)	64 BTN Rawa Aopa Watumohai (10)	64 BTN Rawa Aopa Watumohai (20)	64 BTN Rawa Aopa Watumohai (30)	64 BTN Rawa Aopa Watumohai (45)				

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		65	BTN Sebangau (5)	65	BTN Sebangau (10)	65	BTN Sebangau (15)	65	BTN Sebangau (17)	65	BTN Sebangau (19)
		66	BTN Siberut (2)	66	BTN Siberut (5)	66	BTN Siberut (7)	66	BTN Siberut (8)	66	BTN Siberut (8)
		67	BTN Taka Bonerate (6)	67	BTN Taka Bonerate (6)	67	BTN Taka Bonerate (6)	67	BTN Taka Bonerate (6)	67	BTN Taka Bonerate (6)
		68	BTN Tanjung Puting (5)	68	BTN Tanjung Puting (8)	68	BTN Tanjung Puting (10)	68	BTN Tanjung Puting (10)	68	BTN Tanjung Puting (14)
		69	BBTN Teluk Cendrawasih (5)	69	BBTN Teluk Cendrawasih (10)	69	BBTN Teluk Cendrawasih (13)	69	BBTN Teluk Cendrawasih (18)	69	BBTN Teluk Cendrawasih (28)
		70	BTN Tesso Nilo (7)	70	BTN Tesso Nilo (7)	70	BTN Tesso Nilo (7)	70	BTN Tesso Nilo (7)	70	BTN Tesso Nilo (7)
		71	BTN Ujung Kulon (5)	71	BTN Ujung Kulon (8)	71	BTN Ujung Kulon (9)	71	BTN Ujung Kulon (11)	71	BTN Ujung Kulon (12)
		72	BTN Wakatobi (5)	72	BTN Wakatobi (12)	72	BTN Wakatobi (20)	72	BTN Wakatobi (30)	72	BTN Wakatobi (42)
		73	BTN Wasur (5)	73	BTN Wasur (8)	73	BTN Wasur (10)	73	BTN Wasur (12)	73	BTN Wasur (15)
		74	BTN Way Kambas (5)	74	BTN Way Kambas (10)	74	BTN Way Kambas (12)	74	BTN Way Kambas (14)	74	BTN Way Kambas (17)
	b.		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Hektar)		Pengusulan UPT lingkup Ditjen KSDAE (74 UPT)		Pengusulan UPT lingkup Ditjen KSDAE (74 UPT)		Pengusulan UPT lingkup Ditjen KSDAE (74 UPT)		Pengusulan UPT lingkup Ditjen KSDAE (74 UPT)
	c.	1	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani (Hektar)	1	BBKSDA Jawa Barat (8.674,57)						
		2		2	BBKSDA Jawa Timur (3.038,08)						
		3		3	BBKSDA Nusa Tenggara Timur (17.668,59)						
		4		4	BBKSDA Papua (159.745,66)						
		5		5	BBKSDA Papua Barat (19.017,10)						
		6		6	BBKSDA Riau (42.958,61)						
		7		7	BBKSDA Sulawesi Selatan (32.689,44)						
		8		8	BBKSDA	8	BBKSDA	8	BBKSDA	8	BBKSDA

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		3	4	5	6	7					
1	2		Sumatera Utara (14.443,32)		Sumatera Utara (14.443,32)		Sumatera Utara (14.443,32)		Sumatera Utara (14.443,32)		Sumatera Utara (14.443,32)
		9	BBTN Gunung Gede Pangrango (1.694,51)	9	BBTN Gunung Gede Pangrango (1.694,51)	9	BBTN Gunung Gede Pangrango (1.694,51)	9	BBTN Gunung Gede Pangrango (1.694,51)	9	BBTN Gunung Gede Pangrango (1.694,51)
		10	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (4.672,97)	10	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (4.672,97)	10	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (4.672,97)	10	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (4.672,97)	10	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum (4.672,97)
		11	BBTN Bromo Tengger Semeru (4.324,80)	11	BBTN Bromo Tengger Semeru (4.324,80)	11	BBTN Bromo Tengger Semeru (4.324,80)	11	BBTN Bromo Tengger Semeru (4.324,80)	11	BBTN Bromo Tengger Semeru (4.324,80)
		12	BBTN Bukit Barisan Selatan (99.865,91)	12	BBTN Bukit Barisan Selatan (99.865,91)	12	BBTN Bukit Barisan Selatan (99.865,91)	12	BBTN Bukit Barisan Selatan (99.865,91)	12	BBTN Bukit Barisan Selatan (99.865,91)
		13	BBTN Gunung Leuser (29.798,58)	13	BBTN Gunung Leuser (29.798,58)	13	BBTN Gunung Leuser (29.798,58)	13	BBTN Gunung Leuser (29.798,58)	13	BBTN Gunung Leuser (29.798,58)
		14	BBTN Kerinci Seblat (107.848,27)	14	BBTN Kerinci Seblat (107.848,27)	14	BBTN Kerinci Seblat (107.848,27)	14	BBTN Kerinci Seblat (107.848,27)	14	BBTN Kerinci Seblat (107.848,27)
		15	BBTN Lore Lindu (9.423,57)	15	BBTN Lore Lindu (9.423,57)	15	BBTN Lore Lindu (9.423,57)	15	BBTN Lore Lindu (9.423,57)	15	BBTN Lore Lindu (9.423,57)
		16	BBTN Teluk Cendrawasih (534,67)	16	BBTN Teluk Cendrawasih (534,67)	16	BBTN Teluk Cendrawasih (534,67)	16	BBTN Teluk Cendrawasih (534,67)	16	BBTN Teluk Cendrawasih (534,67)
		17	BKSDA Aceh (5.817,49)	17	BKSDA Aceh (5.817,49)	17	BKSDA Aceh (5.817,49)	17	BKSDA Aceh (5.817,49)	17	BKSDA Aceh (5.817,49)
		18	BKSDA Bali (973,95)	18	BKSDA Bali (973,95)	18	BKSDA Bali (973,95)	18	BKSDA Bali (973,95)	18	BKSDA Bali (973,95)
		19	BKSDA Bengkulu Lampung (27.534,04)	19	BKSDA Bengkulu Lampung (27.534,04)	19	BKSDA Bengkulu Lampung (27.534,04)	19	BKSDA Bengkulu Lampung (27.534,04)	19	BKSDA Bengkulu Lampung (27.534,04)
		20	BKSDA DKI Jakarta (76,13)	20	BKSDA DKI Jakarta (76,13)	20	BKSDA DKI Jakarta (76,13)	20	BKSDA DKI Jakarta (76,13)	20	BKSDA DKI Jakarta (76,13)
		21	BKSDA Jambi (1.844,25)	21	BKSDA Jambi (1.844,25)	21	BKSDA Jambi (1.844,25)	21	BKSDA Jambi (1.844,25)	21	BKSDA Jambi (1.844,25)
		22	BKSDA Jawa Tengah (409,64)	22	BKSDA Jawa Tengah (409,64)	22	BKSDA Jawa Tengah (409,64)	22	BKSDA Jawa Tengah (409,64)	22	BKSDA Jawa Tengah (409,64)
		23	BKSDA Kalimantan Barat	23	BKSDA Kalimantan Barat	23	BKSDA Kalimantan Barat	23	BKSDA Kalimantan Barat	23	BKSDA Kalimantan Barat



KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		3	4	5	6	7					
1	2	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
		BTN Bantimurung Bulusaraung (5.514,62)									
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		BTN Batang Gadis (6.257,50)									
		41	41	41	41	41	41	41	41	41	
		BTN Berbak Sembilang (14.173,48)									
		42	42	42	42	42	42	42	42	42	
		BTN Bogani Nani Wartabone (8.819,86)									
		43	43	43	43	43	43	43	43	43	
		BTN Bukit Baka-Bukit Raya (5.189,38)									
		44	44	44	44	44	44	44	44	44	
		BTN Bukit Duabelas (6.585,31)									
		45	45	45	45	45	45	45	45	45	
		BTN Bukit Tigapuluh (6.642,81)									
		46	46	46	46	46	46	46	46	46	
		BTN Bunaken (1.845,29)									
		47	47	47	47	47	47	47	47	47	
		BTN Gunung Ciremai (2.656,82)									
		48	48	48	48	48	48	48	48	48	
		BTN Gunung Halimun Salak (25.325,67)									
		49	49	49	49	49	49	49	49	49	
		BTN Gunung Merapi (728,17)									
		50	50	50	50	50	50	50	50	50	
		BTN Gunung Merbabu (1.320,70)									
		51	51	51	51	51	51	51	51	51	
		BTN Gunung Palung (12.977,63)									
		52	52	52	52	52	52	52	52	52	
		BTN Gunung Rinjani (7.891,67)									
		53	53	53	53	53	53	53	53	53	
		BTN Gunung Tambora (39.232,31)									
		54	54	54	54	54	54	54	54	54	
		BTN									

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Karimunjawa (725,56)		Karimunjawa (725,56)		Karimunjawa (725,56)		Karimunjawa (725,56)		Karimunjawa (725,56)
		55	BTN Kayan Mentarang (859,66)	55	BTN Kayan Mentarang (859,66)	55	BTN Kayan Mentarang (859,66)	55	BTN Kayan Mentarang (859,66)	55	BTN Kayan Mentarang (859,66)
		56	BTN Kelimutu (1.891,19)	56	BTN Kelimutu (1.891,19)	56	BTN Kelimutu (1.891,19)	56	BTN Kelimutu (1.891,19)	56	BTN Kelimutu (1.891,19)
		57	BTN Kepulauan Seribu (1,83)	57	BTN Kepulauan Seribu (1,83)	57	BTN Kepulauan Seribu (1,83)	57	BTN Kepulauan Seribu (1,83)	57	BTN Kepulauan Seribu (1,83)
		58	BTN Kepulauan Togean (13.315,36)	58	BTN Kepulauan Togean (13.315,36)	58	BTN Kepulauan Togean (13.315,36)	58	BTN Kepulauan Togean (13.315,36)	58	BTN Kepulauan Togean (13.315,36)
		59	BTN Komodo (14.765,54)	59	BTN Komodo (14.765,54)	59	BTN Komodo (14.765,54)	59	BTN Komodo (14.765,54)	59	BTN Komodo (14.765,54)
		60	BTN Kutai (36.812,32)	60	BTN Kutai (36.812,32)	60	BTN Kutai (36.812,32)	60	BTN Kutai (36.812,32)	60	BTN Kutai (36.812,32)
		61	BTN Lorentz (270.434,90)	61	BTN Lorentz (270.434,90)	61	BTN Lorentz (270.434,90)	61	BTN Lorentz (270.434,90)	61	BTN Lorentz (270.434,90)
		62	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (13.080,46)	62	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (13.080,46)	62	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (13.080,46)	62	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (13.080,46)	62	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (13.080,46)
		63	BTN Manusela (2.377,14)	63	BTN Manusela (2.377,14)	63	BTN Manusela (2.377,14)	63	BTN Manusela (2.377,14)	63	BTN Manusela (2.377,14)
		64	BTN Meru Betiri (4.870,59)	64	BTN Meru Betiri (4.870,59)	64	BTN Meru Betiri (4.870,59)	64	BTN Meru Betiri (4.870,59)	64	BTN Meru Betiri (4.870,59)
		65	BTN Rawa Aopa Watumohai (27.325,93)	65	BTN Rawa Aopa Watumohai (27.325,93)	65	BTN Rawa Aopa Watumohai (27.325,93)	65	BTN Rawa Aopa Watumohai (27.325,93)	65	BTN Rawa Aopa Watumohai (27.325,93)
		66	BTN Sebangau (5.361,90)	66	BTN Sebangau (5.361,90)	66	BTN Sebangau (5.361,90)	66	BTN Sebangau (5.361,90)	66	BTN Sebangau (5.361,90)
		67	BTN Siberut (19.810,05)	67	BTN Siberut (19.810,05)	67	BTN Siberut (19.810,05)	67	BTN Siberut (19.810,05)	67	BTN Siberut (19.810,05)
		68	BTN Taka Bonerate (287,28)	68	BTN Taka Bonerate (287,28)	68	BTN Taka Bonerate (287,28)	68	BTN Taka Bonerate (287,28)	68	BTN Taka Bonerate (287,28)
		69	BTN Tanjung Puting (307,63)	69	BTN Tanjung Puting (307,63)	69	BTN Tanjung Puting (307,63)	69	BTN Tanjung Puting (307,63)	69	BTN Tanjung Puting (307,63)
		70	BTN Tesso Nilo (66.673,13)	70	BTN Tesso Nilo (66.673,13)	70	BTN Tesso Nilo (66.673,13)	70	BTN Tesso Nilo (66.673,13)	70	BTN Tesso Nilo (66.673,13)
		71	BTN Ujung Kulon (23.729,59)	71	BTN Ujung Kulon (23.729,59)	71	BTN Ujung Kulon (23.729,59)	71	BTN Ujung Kulon (23.729,59)	71	BTN Ujung Kulon (23.729,59)

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA										
		2020		2021		2022		2023		2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		72	BTN Wakatobi (3,77)	72	BTN Wakatobi (3,77)	72	BTN Wakatobi (3,77)	72	BTN Wakatobi (3,77)	72	BTN Wakatobi (3,77)	
		73	BTN Wasur (14.356,08)	73	BTN Wasur (14.356,08)	73	BTN Wasur (14.356,08)	73	BTN Wasur (14.356,08)	73	BTN Wasur (14.356,08)	
		74	BTN Way Kambas (3.455,20)	74	BTN Way Kambas (3.455,20)	74	BTN Way Kambas (3.455,20)	74	BTN Way Kambas (3.455,20)	74	BTN Way Kambas (3.455,20)	
		75	UPTD TAHURA (35 unit) (152.273,28)	75	UPTD TAHURA (35 unit) (152.273,28)	75	UPTD TAHURA (35 unit) (152.273,28)	75	UPTD TAHURA (35 unit) (152.273,28)	75	UPTD TAHURA (35 unit) (152.273,28)	
	c.	Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KK)		Seluruh UPT (74 Satker)								
<b>Konservasi Spesies dan Genetik</b>	a.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Hektar)		Seluruh UPT (74 Satker) <i>(penjumlahan inventarisasi PIKA dan BPEE)</i>		Seluruh UPT (74 Satker) <i>(penjumlahan inventarisasi PIKA dan BPEE)</i>		Seluruh UPT (74 Satker) <i>(penjumlahan inventarisasi PIKA dan BPEE)</i>		Seluruh UPT (74 Satker) <i>(penjumlahan inventarisasi PIKA dan BPEE)</i>		Seluruh UPT (74 Satker) <i>(penjumlahan inventarisasi PIKA dan BPEE)</i>
	b.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1	Jawa Barat								
			2	Jawa Timur								
			3	Nusa Tenggara Timur								
			4	Papua								
			5	Papua Barat								
			6	Riau								
			7	Sulawesi Selatan								
			8	Sumatera Utara								
			9	Nanggro Aceh Darusalam								
			10	Bali								
			11	Bengkulu								
			12	Jakarta								
			13	Jambi								
			14	Jawa Tengah								
			15	Kalimantan Barat								
			16	Kalimantan Selatan								
17	Kalimantan	17	Kalimantan	17	Kalimantan	17	Kalimantan	17	Kalimantan			

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
1	2	3		4		5		6		7	
		18	Tengah Kalimantan Timur	18	Tengah Kalimantan Timur	18	Tengah Kalimantan Timur	18	Tengah Kalimantan Timur	18	Tengah Kalimantan Timur
		19	Maluku	19	Maluku	19	Maluku	19	Maluku	19	Maluku
		20	Nusa Tenggara Barat	20	Nusa Tenggara Barat	20	Nusa Tenggara Barat	20	Nusa Tenggara Barat	20	Nusa Tenggara Barat
		21	Sulawesi Tengah	21	Sulawesi Tengah	21	Sulawesi Tengah	21	Sulawesi Tengah	21	Sulawesi Tengah
		22	Sulawesi Tenggara	22	Sulawesi Tenggara	22	Sulawesi Tenggara	22	Sulawesi Tenggara	22	Sulawesi Tenggara
		23	Sulawesi Utara	23	Sulawesi Utara	23	Sulawesi Utara	23	Sulawesi Utara	23	Sulawesi Utara
		24	Sumatera Barat	24	Sumatera Barat	24	Sumatera Barat	24	Sumatera Barat	24	Sumatera Barat
		25	Sumatera Selatan	25	Sumatera Selatan	25	Sumatera Selatan	25	Sumatera Selatan	25	Sumatera Selatan
		26	D.I Yogyakarta	26	D.I Yogyakarta	26	D.I Yogyakarta	26	D.I Yogyakarta	26	D.I Yogyakarta
	c. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA
	d. Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Sistem)		DKI Jakarta (Pusat)		DKI Jakarta (Pusat)		DKI Jakarta (Pusat)		DKI Jakarta (Pusat)		DKI Jakarta (Pusat)
	e. Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (Unit)	1.	DKI Jakarta (Pusat)	1	Jawa Timur						
				2	Maluku	2	Maluku	2	Maluku	2	Maluku
				3	Kalimantan Barat						
				4	Sumatera Utara						
				5	Papua	5	Papua	5	Papua	5	Papua
<b>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</b>	a. Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)	1	TN Bromo Tengger Semeru	1	TN Bromo Tengger Semeru	1	TN Bromo Tengger Semeru	1	TN Bromo Tengger Semeru	1	TN Bromo Tengger Semeru
		2	TN Bantimurung Bulusaraung	2	TN Bantimurung Bulusaraung	2	TN Bantimurung Bulusaraung	2	TN Bantimurung Bulusaraung	2	TN Bantimurung Bulusaraung
		3	TN Gunung Rinjani	3	TN Gunung Rinjani	3	TN Gunung Rinjani	3	TN Gunung Rinjani	3	TN Gunung Rinjani
		4	TN Bali Barat	4	TN Bali Barat	4	TN Bali Barat	4	TN Bali Barat	4	TN Bali Barat
		5	TWA Kawah Ijen	5	TWA Kawah Ijen	5	TWA Kawah Ijen	5	TWA Kawah Ijen	5	TWA Kawah Ijen
		6	TN Gunung Merapi	6	TN Gunung Merapi	6	TN Gunung Merapi	6	TN Gunung Merapi	6	TN Gunung Merapi
		7	TN Gunung Merbabu	7	TN Gunung Merbabu	7	TN Gunung Merbabu	7	TN Gunung Merbabu	7	TN Gunung Merbabu

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		3	4	5	6	7					
1	2	8	TN Gunung Tambora	8	TN Gunung Tambora	8	TN Gunung Tambora	8	TN Gunung Tambora	8	TN Gunung Tambora
		9	TN Kelimutu	9	TN Kelimutu	9	TN Kelimutu	9	TN Kelimutu	9	TN Kelimutu
		10	TWA Gunung Tunak	10	TWA Gunung Tunak	10	TWA Gunung Tunak	10	TWA Gunung Tunak	10	TWA Gunung Tunak
		11	TWA Muka Kuning	11	TWA Muka Kuning	11	TWA Muka Kuning	11	TWA Muka Kuning	11	TWA Muka Kuning
		12	TWA Sorong	12	TWA Sorong	12	TWA Sorong	12	TWA Sorong	12	TWA Sorong
		13	TWA Tanjung Belimbing	13	TWA Tanjung Belimbing	13	TWA Tanjung Belimbing	13	TWA Tanjung Belimbing	13	TWA Tanjung Belimbing
		14	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	14	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	14	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	14	TN Betung Kerihun Danau Sentarum	14	TN Betung Kerihun Danau Sentarum
		15	TN Teluk Cendrawasih	15	TN Teluk Cendrawasih	15	TN Teluk Cendrawasih	15	TN Teluk Cendrawasih	15	TN Teluk Cendrawasih
	b.	1	BKSDA Jawa Tengah-Air	1	BKSDA Jawa Tengah-Air	1	BKSDA Sulawesi Utara-Air	1	BKSDA Sulawesi Utara-Air	1	BKSDA NTT-Air
		2	BKSDA Jawa Barat-Air	2	BKSDA Jawa Barat-Air	2	BKSDA Sulawesi Selatan-Air	2	BKSDA Sulawesi Selatan-Air	2	BKSDA Sumatera Barat-Air
		3	BKSDA Sumatera Barat-Air	3	BKSDA Sulawesi Tenggara-Air	3	BKSDA Sumatera Utara-Air	3	BKSDA Sumatera Utara-Air	3	BKSDA Bali-Air
		4	BKSDA NTT-Air	4	BKSDA Sumatera Barat-Air	4	BKSDA Sumatera Selatan-Air	4	BKSDA Sumatera Selatan-Air	4	BKSDA Kalimantan Barat-Air
		5	BKSDA Bali-Air	5	BKSDA NTT-Air	5	BKSDA Bengkulu-Air	5	BKSDA Bengkulu-Air	5	BKSDA Riau-Air
		6	TN Bogani Nani Wartabone-Air	6	BKSDA Bali-Air	6	BKSDA Kalimantan Selatan-Air	6	BKSDA Kalimantan Selatan-Air	6	BKSDA Sulawesi Tengah-Air
		7	TN Bali Barat-Air	7	BKSDA Kalimantan Barat-Air	7	BKSDA Papua-Air	7	BKSDA Papua-Air	7	BKSDA Papua-Air
		8	TN Gunung Rinjani-Air	8	BKSDA Riau-Air	8	BKSDA Papua Barat-Air	8	BKSDA Papua Barat-Air	8	BKSDA Papua Barat-Air
		9	TN Gunung Palung-Air	9	BKSDA Sulawesi Tengah-Air	9	TN Ujung Kulon-Air	9	TN Ujung Kulon-Air	9	TN Kayan Mentarang-Air
		10	TN Kerinci Seblat-Air	10	TN Bogani Nani Wartabone-Air	10	TN Gunung Gede Pangrango-Air	10	TN Gunung Gede Pangrango-Air	10	TN Gunung Halimun Salak-Air
		11	TN Bogani Nani Wartabone-Karbon	11	TN Bali Barat-Air	11	TN Batang Gadis-Air	11	TN Batang Gadis-Air	11	TN Lore Lindu-Air

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12	TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti-Karbon	12	TN Bukit Barisan Selatan-Air	12	TN Matalawa-Air	12	TN Matalawa-Air	12	TN Betung Kerihun Danau Sentarum-Air
		13	TN Bukit Baka Karbon	13	TN Gunung Rinjani-Air	13	TN Gunung Merbabu-Air	13	TN Gunung Merbabu-Air	13	TN Gunung Leuseur-Air
		14	TN Bukit Barisan Selatan - Karbon	14	TN Gunung Palung-Air	14	TN Gunung Ciremai-Air	14	TN Gunung Ciremai-Air	14	TN Bukit Dua Belas-Air
		15	TN Bukit Tiga Puluh - Karbon	15	TN Kerinci Seblat-Air	15	TN Gunung Merapi-Air	15	TN Gunung Merapi-Air	15	TN Siberut-Air
				16	TN Sebangau-Karbon	16	BKSDA Riau-Air	16	TN Gunung Ciremai-Karbon	16	TN Meru Betiri-Karbon
				17	TN Lore Lindu-Karbon	17	BKSDA Sulawesi Tengah-Air	17	TN Rawa Aopa Watumohai-Karbon	17	TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum-Karbon
				18	TN Kayan Mentarang-Karbon	18	BKSDA Sulawesi Tenggara-Air	18	TN Gunung Halimun Salak - Karbon	18	TN Bali Barat-Karbon
				19	TN Kutai - Karbon	19	TN Bukit Barisan Selatan-Air	19	TN Meru Betiri-Karbon	19	TN Gunung Tambora-Karbon
				20	TWA Gunung Ambang - BKSDA Sulawesi Utara - Panas Bumi	20	BKSDA Kalimantan Barat-Air	20	TN Bali Barat-Karbon	20	TN Tanjung Puting-Karbon
						21	TN Berbak Sembilang-Karbon	21	TN Aketajawe Lolobata-Karbon	21	Tahura R. Soeryo-Panas Bumi
						22	TN Gunung Palung-Karbon	22	TWA Gunung Ambang-BKSDA Sulawesi Tenggara-Panas Bumi		
						23	TN Manusea-Karbon	23	Tahura R. Soeryo - Panas Bumi		
						24	TN Sebangau-Karbon	24	TN Gunung Halimun Salak - Panas Bumi		

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
1	2	3		4		5		6		7	
						25	TN Lore Lindu- Karbon	25	TWA Kawah Kamojang – BBKSDA Jabar- Panas Bumi		
						26	TN Kutai- Karbon	26	TWA Gn. Papandayan – BBKSDA Jabar – Panas Bumi		
						27	TN Bromo Tengger Semeru - Karbon				
						28	TWA Gunung Ambang-BKSDA Sulawesi Tenggara-Panas Bumi				
						29	TN Gunung Ceremai- Panas Bumi				
						30	TWA Linggarjati – BBKSDA Jawa Barat- Panas Bumi				
						31	TWA Gunung Tampomas – BBKSDA Jawa Barat – Panas Bumi				
						32	TN Gunung Rinjani – Panas Bumi				
						33	TWA Gunung Batur – BKSDA Bali – Panas Bumi				
						34	TN Gunung Halimun – Panas Bumi				
						35	TWA Kawah Kamojang – Panas Bumi				
						36	TWA Gunung Papandayan – BBKSDA Jawa				

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Barat - Panas Bumi				
	c. Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> (Destinasi)	1	TN Komodo	1	TN Komodo	1	TN Komodo	1	TN Komodo	1	TN Komodo
		2	TN Baluran	2	TN Baluran	2	TN Baluran	2	TN Baluran	2	TN Baluran
		3	TN Alas Purwo	3	TN Alas Purwo	3	TN Alas Purwo	3	TN Alas Purwo	3	TN Alas Purwo
		4	TN Gunung Leuser	4	TN Gunung Leuser	4	TN Gunung Leuser	4	TN Gunung Leuser	4	TN Gunung Leuser
		5	TWA Kamojang Papandayan	5	TWA Kamojang Papandayan	5	TWA Kamojang Papandayan	5	TWA Kamojang Papandayan	5	TWA Kamojang Papandayan
		6	KHDTK Aek Nauli (BBKSDA Sumut)	6	KHDTK Aek Nauli (BBKSDA Sumut)	6	KHDTK Aek Nauli (BBKSDA Sumut)	6	KHDTK Aek Nauli (BBKSDA Sumut)	6	KHDTK Aek Nauli (BBKSDA Sumut)
		7	Hutan Pendidikan Wanagama (BKSDA DIY)	7	Hutan Pendidikan Wanagama (BKSDA DIY)	7	Hutan Pendidikan Wanagama (BKSDA DIY)	7	Hutan Pendidikan Wanagama (BKSDA DIY)	7	Hutan Pendidikan Wanagama (BKSDA DIY)
	d. Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)	1	TN Wakatobi	1	TN Wakatobi	1	TN Wakatobi	1	TN Wakatobi	1	TN Wakatobi
		2	TN Bunaken	2	TN Bunaken	2	TN Bunaken	2	TN Bunaken	2	TN Bunaken
		3	TN Takabonerate	3	TN Takabonerate	3	TN Takabonerate	3	TN Takabonerate	3	TN Takabonerate
<b>Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial</b>	a. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (Juta Hektar)		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA		34 Provinsi pada 26 UPT Balai/Balai Besar KSDA
	b. Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya (Unit KEE)	1	BKSDA Kalimantan Barat - KEE Koridor Sungai Putri	1	BKSDA Kalimantan Timur-Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay	1	BKSDA Sulawesi Utara-Koridor Tanjung Binerean	1	BKSDA Sumatera Barat-Koridor Harimau dan Satwa Liar lainnya Kab Solok dan Dharmasraya	1	BKSDA Aceh-Koridor Gajah Meriah
		2	BKSDA Kalimantan Tengah - ABKT Lahan Basah Danau Bagantung	2	BKSDA Bengkulu-Koridor Gajah Lansekap Seblat	2	BKSDA NTB-Koridor Penyu Lombok Barat	2	BKSDA Sulawesi Tenggara - Koridor Foobula	2	BKSDA Jambi-Koridor Gajah Bukit Tigapuluh
		3	BBKSDA Jawa Barat ekosistem	3	BKSDA Jawa Tengah - ABKT	3	BKSDA NTB-ABKT Kab.	3	BKSDA Kalimantan	3	BBKSDA Jatim - Pantai Kili-kili

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2		Karst Kabupaten Ciamis		Gunung Ungaran		Lombok Utara		Selatan - ABKT Tanah Laut		
		4	BBKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon	4	BKSDA Jawa Tengah -ABKT Petungkriyono	4	BBKSDA Jawa Barat - ABKT Kab. Ciamis	4	BKSDA Maluku-ABKT Tanjung Maleo Negeri Kailolo	4	BBKSDA Jatim - Pulau Masakambing
		5	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung	5	BKSDA Kalimantan Selatan - ABKT Tanah Laut	5	BKSDA Kalimantan Timur-ABKT Danau Mesangat	5	BKSDA Sulawesi Tengah-ABKT Kabupaten Tojo Una-una	5	BKSDA Maluku - ABKT Pulau Buano
		6	BKSDA Sulawesi Tengah Taman Keanekaragaman Hayati Banggai Kepulauan	6	BBKSDA NTT-ABKT Rote Ndao	6	BBKSDA Jawa Timur Ekosistem Karst Kabupaten Trenggalek	6	BBKSDA NTT-ABKT Hutan Lindung POTA, Kec. Sambi Rempas, Kab. Manggara Timur	6	BKSDA Yogyakarta Ekosistem Karst Gunung Kidul
		7	BBKSDA Jawa Timur KEE Mangrove Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi	7	BBKSDA Sulawesi Tengah Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan	7	BKSDA Sumatera Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kota Solok Provinsi Sumatera Barat	7	BBKSDA Jawa Barat Ekosistem Karst Kabupaten Tasikmalaya	7	BKSDA Kalimantan Selatan Taman Keanekaragaman hayati Kota Banjar Baru
		8	BKSDA Bengkulu KEE Mangrove Lampung Timur Provinsi Lampung	8	BBKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kiera Payung Provinsi Jawa Barat	8	BKSDA Kalimantan Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau	8	BKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bandung	8	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Muara Enim
		9	BKSDA NTB KEE Mangrove Lambo Kabupaten Bima	9	BBKSDA Jawa Timur Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten	9	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman	9	BKSDA Sumatera Barat Taman Keanekaragaman Hayati	9	BKSDA Sumatera Selatan KEE Mangrove Lepar Pongok

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI TARGET KINERJA									
		2020		2021		2022		2023		2024	
1	2	3		4		5		6		7	
					Jombang Provinsi Jawa Timur		n Hayati Bangka Tengah		Kabupaten Padang Pariaman		Kabupaten Bangka Selatan
		10	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Desa Ayah Kabupaten Kebumen	10	BBKSDA Jawa Barat Taman Kehati Kabupaten Kuningan	10	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Mojo Kabupaten Pemalang	10	BKSDA Sulawesi Utara KEE Mangrove Torosiaje Provinsi Gorontalo	10	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Kabupaten Rembang
		11	BKSDA NTB KEE Mangrove Lombok Barat	11	BBKSDA Jawa Timur KEE Mangrove Ujung Pangkah Kabupaten Gresik	11	BBKSDA Sumatera Utara KEE Mangrove Jaring Halus Kabupaten Langkat	11	BKSDA Maluku KEE Mangrove Kao Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara	11	BKSDA Jambi KEE Mangrove Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur

LAMPIRAN 4

Target Kinerja Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 – berdasarkan Prioritas Nasional pada RPJMN 2020-2024

Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Kode				PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Satuan	Target					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
a	b	c	d				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2				<b>PROGRAM PRIORITAS:</b> Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air ( <i>water productivity</i> )	US\$/m³	4	4,35	4,7	5,05	5,4							
2	1			<b>KEGIATAN PRIORITAS:</b> Pemantapan kawasan berfungsi lindung	Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	Juta ha	65	65	65	65	65	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321	30525,5	
2	1	1		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Eko-region	7	7	7	7	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
2	1	1	6	Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Juta ha	70	70	70	70	70	300	330,0	363,0	399,3	439,2	1.831,5	PIKA, KKH, BPEE
2	1	2		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi		500	1.500	2.500	3.500	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.422,3	
2	1	2	1	Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	554	554	554	554	554	18,0	22,0	24,2	26,6	29,3	120,1	PIKA, KK, PJLHK
2	1	2	2	Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	desa	500	1.500	2.500	3.500	4.500	450	495,0	544,5	599,0	658,8	2.747,3	KK

Kode				PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Satuan	Target					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
a	b	c	d				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2	1	2	3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KEE	11	22	33	44	55	9	9,9	10,9	12,0	13,2	54,9	BPEE
2	1	2	4	Penanganan permasalahan di kawasan konservasi ( <i>opened area</i> )	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Juta Ha	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	KK
2	2			<b>KEGIATAN PRIORITAS:</b> Pengelolaan hutan berkelanjutan	Luas kawasan hutan produksi	Juta hektar	36	36	36	36	36	300	300	300	300	300	1500	
2	2	1		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	Unit	30	30	30	30	30							Peningkatan Usaha Hutan Produksi
2	2	1	4	Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi (air, panas bumi, dan karbon)	Jumlah unit pemanfaatan	Unit	20	40	60	80	100	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0	PJLHK
6				<b>PROGRAM PRIORITAS:</b> Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian	Persen	3,77-3,79	3,84-3,91	3,86-3,93	3,87-3,98	3,90-4,03	9.840,5	10.824,6	11.907,1	13.097,8	14.407,5	60.077,5	
					Kontribusi PDB kemaritiman	Persen	6,5	6,85	7,2	7,5	7,8							
					Pertumbuhan PDB industri (9.2.1(a))	Persen	5,00-5,40	5,10-6,56	5,22-7,23	5,45-7,45	5,93-8,35							
					Kontribusi PDB pariwisata (8,9,1*)	Persen	4,8	5	5,2	5,3	5,5							
					Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp triliun	1.305-1.307	1.439-1.453	1.573-1.599	1.707-1.745	1.840-1.890	1.212,4	1.321,5	1.440,4	1.526,8	1.618,4	7.119,4	
					Pertumbuhan	Persen	6,9-7,3	7,2-7,7	7,2-8,1	7,5-8,3	7,5-8,6							

Kode				PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Satuan	Target					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
a	b	c	d				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
					investasi (PMTB)													
					Penyediaan lapangan kerja per tahun	Juta orang	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0							
					Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*)	Persen	4,5-5,5	4,7-5,9	4,8-6,3	4,9-6,7	5,0-7,0							
					Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*)	Persen	14,2	14,6	14,95	15,3	15,7	235,4	256,6	279,7	296,5	314,2	1382,4	
					Jumlah tenaga kerja industri	Juta orang	19,7	20,3	20,9	21,4	22	568,5	619,7	675,4	716,0	758,9	3338,5	
					Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*)	Juta orang	13	14	14	15	15	382,6	417,0	454,6	481,8	510,7	2246,7	
					Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Juta orang	19	20	20	21	21	74,5	81,2	88,5	93,8	99,4	437,3	
6	1			<b>KEGIATAN PRIORITAS:</b> Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	Persen	8,09-8,22	8,21-8,37	8,33-8,51	8,45-8,65	8,57-8,79	25,0	27,3	29,7	31,5	33,4	15.333,8	
					Kontribusi PDB industri (9.2.1*)	Persen	19,82-19,85	19,81-20,12	19,84-20,45	19,90-20,78	20,06-21,28	1.380,0	1.504,2	1.639,6	1.738,0	1.842,2	8.104,0	
					Pertumbuhan PDB industri non migas	Persen	5,58-6,00	5,68-7,24	5,79-7,92	5,94-8,09	6,11-8,36	1.380,0	1.504,2	1.639,6	1.738,0	1.842,2	8.104,0	
6	1	4		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Pengembangan industri berbasis keketahanan														

Kode				PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Satuan	Target					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
a	b	c	d				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
6	1	4	4	Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (unit)	Unit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,5	1,0	1,3	1,8	2,2	6,8	KKH
6	3			<b>KEGIATAN PRIORITAS:</b> Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan	Destinasi	3				8							
					Revitalisasi destinasi	Destinasi	0	0	1	1	1	25,5	27,8	30,3	32,1	34,0	149,7	
					Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis taman nasional	Klaster	12	12	12	12	12	22,0	24,0	26,1	27,7	29,4	129,2	
					Destinasi wisata bahari	Destinasi	8	8	8	8	8	7,0	7,6	8,3	8,8	9,3	41,1	
6	3	1		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Pengembangan 18 TN Prioritas dan TWA Prioritas untuk mendukung KSPN	Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas	Destinasi	18	18	18	18	18	22,0	24,0	26,1	27,7	29,4	1.800,0	
6	3	1	1	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam Bahari	Destinasi	3	3	3	3	3	80	80	80	80	80	400,0	PJLHK
6	3	1	2	Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education)	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	Destinasi	7	7	7	7	7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0	PJLHK

Kode				PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Satuan	Target					Alokasi Pendanaan (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
a	b	c	d				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
6	3	1	3	Pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas	Jumlah Destinasi Wisata Alam Prioritas	Destinasi	15	15	15	15	15	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	900,0	PJLHK

Prioritas Nasional 2 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PP	KP	Pro-PN	Pro-K/L	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional/Proyek	Indikator	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
4				<b>PP 4: Pembangunan Wilayah Kalimantan</b>														
4	3			<b>KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan</b>	<b>Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Jawa Bali</b>													
4	3			<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>														
4	3			<b>Pembangunan Ibu Kota Negara</b>												<b>132.1</b>		
				Penyiapan lahan ibu kota dari Kawasan Hutan	Luas Kawasan IKN yang Dinventarisasi dan Verifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (Ha)	180,640	180,640	180,640	-	-	11	12,1	13,3			36,4	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN	Luas Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi lokasi IKN) (Ha)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	18	19,8	21,8	24,0	26,4	95,7	Pengelolaan Kawasan Konservasi	

Prioritas Nasional 6 : : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

a	b	c	d	PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional/ Proyek KL	Indikator (Satuan)	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
				<b>PRIORITAS NASIONAL: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	73,00 - 74,50	73,50 - 75,50	74,00 - 76	74,50 - 77,00	75,00 - 78,00							
					Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim terhadap total PDB	%												
					Penurunan emisi gas rumah kaca terhadap baseline	%	26,0	26,5	26,7	27,1	27,3							
					Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca terhadap baseline	%	15,2	18,8	21,3	22,8	24,0							
1				<b>PROGRAM PRIORITAS: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Udara	IKU	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5						34.083,7	
1					Indeks Kualitas Air	IKA	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5							
1					Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	IKAL	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5							
1					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5							
1	1			<b>KEGIATAN PRIORITAS: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan</b>	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	Lokasi	1.139	1.141	1.141	1.141	1.141							

a	b	c	d	PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional/ Proyek KL	Indikator (Satuan)	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
				Hidup														
1	1				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu	Unit usaha	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750							
1	1				Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	juta ha	89	89	89	89	89							
1	1				Persentase penurunan luas hutan/lahan yang terbakar	%	2	2	2	2	2							
1	1				Luas kawasan konservasi	juta ha	27	27	27	27	27							
1	1				Luas Kawasan konservasi perairan	juta ha	23.4	24.2	25.1	26.0	26.9							
1	1				Akurasi informasi meteorologi	%	76	77	78	79	80							
1	1				Akurasi informasi klimatologi	%	75	76	77	78	79							
1	1	5		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Luas hutan dengan indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Juta ha	65	65	65	65	65							
					Luas kawasan konservasi	juta ha	27	27	27	27	27							
					Jumlah Kawasan Konservasi Laut yang dikelola	Juta ha	10	14.5	17.5	19	20							

a	b	c	d	PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional/ Proyek KL	Indikator (Satuan)	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L	
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
					secara berkelanjutan														
					Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan	Jenis	6	8	12	16	20								
					Jumlah areal konservasi insitu yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	Juta ha	22	32	44	55	66								
					Jumlah Kebun Raya baru yang dikelola	unit	2	2	3	3	3								
1	1	5	1	Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Juta hektar	70	70	70	70	70						61,0	PIKA	
1	1	5	3	Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas kawasan konservasi	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	unit KK	554	554	554	554	554	20,0	22,0	24,2	26,6	29,3	122,1	PIKA	
1	1	5	4	Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	desa	500	1.500	2.500	3.500	4.500	450	495,0	544,5	599,0	658,8	2.747,3	KK	
1	1	5	5	Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	unit KEE	11	22	33	44	55	9	9,9	10,9	12,0	13,2	54,9	BPEE	

a	b	c	d	PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional/ Proyek KL	Indikator (Satuan)	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
				berfungsi														
1	1	5	6	Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi ( <i>open area</i> )	Luas <i>open area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	juta ha	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	KK
1	1	6		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tersedianya data & informasi Sumber Daya Alam (SDA), Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dan Neraca SDA (NSDA)		14	24	24	28	28							
1	1				Jumlah luas kawasan sebagai penyediaan data, informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	juta ha	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4							
1	1				Jumlah luas kawasan sebagai penyediaan data, informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	juta ha	8	8	8	8	8							
1	1	6	1	Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman	juta ha	70	70	70	70	70	300,0	330,0	363,0	399,3	439,2	1.831,5	PIKA, KKH,

a	b	c	d	PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional/ Proyek KL	Indikator (Satuan)	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
				partisipatif	tinggi secara partisipatif													
1	1	6	2	Pengembangan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	simpul data	4	4	4	5	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	PIKA
1	1	6	3	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	sistem	1	1	1	1	1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0	KKH
1	3			<b>KEGIATAN PRIORITAS: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	HA	301.800	302.000	302.500	303.000	303.500							
1	3				Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan	ton	260.000	220.000	270.000	220.000	230.000							
1	3				Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	lokasi	20	21	22	24	26							
1	3				Jumlah spesies TSL terancam punah yang meningkat populasinya sebesar 10% dalam 5 tahun	jenis	25	25	25	25	25							

a	b	c	d	PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional/ Proyek KL	Indikator (Satuan)	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	3	5		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	juta ha	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8							
1	3	4		Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi ( <i>opened area</i> )	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Juta Ha	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000	KK
1	3	5		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	Jumlah Kebun Raya Baru yang dikembangkan/inisiasi	unit	2	2	2	2	2							
1	3	5			Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	juta ha	10	10	10	10	10							
1	3	5			Jumlah spesies tumbuhan terancam punah yang terkonservasi di Kebun Raya	spesies	4	4	4	4	4							
1	3	5	1	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	juta ha	10	10	10	10	10	94,0	96,8	99,8	102,7	105,8	499,2	KKH

a	b	c	d	PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional/ Proyek KL	Indikator (Satuan)	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	3	5	2	Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati	Jumlah Entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,5	1,0	1,3	1,8	2,2	6,8	KKH
1	3	5	4	Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (Jumlah pusat penyelamatan satwa yang dibangun)	unit	5	5	5	5	5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	KKH
3				<b>PROGRAM PRIORITAS: Pembangunan Rendah Karbon</b>	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi	%	6,4	6,7	7,0	7,1	7,2							
3					Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan	%	38,7	43,1	45,0	48,2	49,4							
3					Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah	%	12,4	12,5	12,6	12,7	12,7							
3					Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	%	1,4	2,2	6,9	12,8	18,9							
3					Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan	%	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3							
3	2			<b>KEGIATAN PRIORITAS: Pemulihan Lahan Berkelanjutan</b>	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	ha	301.800	335.000	335.000	335.000	335.000							

a	b	c	d	PP/KP/ Proyek Prioritas Nasional/ Proyek KL	Indikator (Satuan)	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Total Alokasi (Rp Miliar)	Kegiatan K/L
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
3	2				Luas hutan dan lahan yang terhabilitasi secara nasional	ha	336.000	370.000	380.000	375.000	370.000							
3	2	3		<b>PROYEK PRIORITAS NASIONAL:</b> Pengurangan laju deforestasi	Laju Deforestasi		350.000	340.000	330.000	320.000	310.000							
3	2	3	1	Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Juta hektar	70	70	70	70	70						0	PIKA, KKH, dan BPEE
3	2	3	1	Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi	Luas unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	unit KK	554	554	554	554	554						0	PIKA, KK, PJLHK
3	2	3	1	Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi	desa	500	1.500	2.500	3.500	4.500						0	KK
3	2	3	1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KEE	11	22	33	44	55						0	BPEE
3	2	3	1	Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi ( <i>open area</i> )	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	juta ha	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8						0	KK

**LAMPIRAN 5**  
**Kerangka Regulasi Ditjen KSDAE**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Regulasi Baru pengganti PermenLHK No. 84 tahun 2015	1. Perlunya peraturan baru terkait penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi, PermenLHK No. 84 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan hutan tidak secara spesifik mengatur kawasan konservasi dan tidak memungkinkan mendorong para pengelola kawasan konservasi aktif melakukan penanganan konflik tenurial di wilayah kelolanya karena sifat penanganan konflik yang ada saat ini berbasis pengaduan. 2. Perlu regulasi penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi yang mampu tidak hanya mendorong tapi mewajibkan para pengelola kawasan mampu bertanggung jawab menangani konflik tenurial yang ada di wilayah kelolanya (aktif)	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
2	Regulasi baru berupa Penyusunan NSPK tentang Pengelolaan Taman Buru	1. Belum ada regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Taman buru 2. Permenlhk No. P.35/menlhk/setjen/kum.1/3/ 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada KSA dan KPA serta Penyusunan Perencanaan KSA dan KPA, tidak termasuk Taman Buru	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
3	Revisi ketentuan sebagai berikut : 1. Permenhut No. 48 tahun 2014; 2. Perdirjen KSDAE No.06/2018; 3. Perdirjen KSDAE No.12/2015; 4. Perdirjen KSDAE No.13/2015.	Kebutuhan pedoman untuk implementasi di lapangan mengingat tingginya kompleksitas permasalahan PE perairan laut/terumbu karang, PE melalui Mekanisme alam dan PE Mangrove, NSPK Perairan maupun kebutuhan inovasi/iptek PE	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020 – 2023
4	Regulasi baru berupa Inpres perlindungan TSL	Banyaknya TSL yang berada di luar KK yang terancam dan harus dilindungi	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
5	Revisi Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL	Maraknya pemanfaatan TSL dalam bentuk pemeliharaan untuk kesenangan/hobi yang skemanya belum diatur secara detail dalam regulasi khusus. Hal ini juga merupakan mandat dalam Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
6	Revisi ketentuan sebagai berikut : 1. Permenhut No.P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkapan TSL 2. Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL	Maraknya penyelenggaraan lomba burung berkicau dalam berbagai level yang perlu diatur tata cara penyelenggaraannya.	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
7	Regulasi baru berupa Inpres yang memayungi implementasi Strategi Aksi Konservasi 25 Spesies Prioritas	1. Perburan dan perdagangan satwa prioritas yang masih masih sehingga perlu keterlibatan aktif lintas kementerian 2. Tumpang tindih penggunaan kawasan yang menjadi habitat satwa prioritas	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020-2022
8	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner	Otoritas veteriner nasional di bidang hewa ternak dan hewan akuatik sudah ada sedangkan di bidang satwa liar belum ada	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2023 – 2024
9	Regulasi baru berupa PermenLHK ARL Satwa Invasif	Sebagai dasar regulasi penetapan manajemen yang sesuai dalam pengendalian hewan/satwa invasif di Indonesia	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2021 – 2023
10	Revisi Perdirjen ARL IAS	Sebagai dasar regulasi penetapan tumbuhan dan satwa invasif di Indonesia	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020 – 2021
11	Regulasi baru berupa Permenlhk	permohonan pengkajian keamanan lingk PRG jasad renik non vaksin	KSDAE	Biro hukum dan	2021 – 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	tentang pedoman penyusunan ARL jasad renik PRG non vaksin	semakin banyak		jajaran KSDAE	
12.	Regulasi baru berupa Pelaporan Kesehatan satwa Liar Sehat/Satli	Aplikasi sudah ada dan sudah dicobakan di 4 pilot project serta Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis di satwa liar dapat dilakukan secara cepat deteksi, cepat lapor dan cepat respons,	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020 - 2021
13.	Revisi PP 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Perkembangan bioteknologi yang semakin cepat harus diikuti pula dengan regulasi yang mendukung keamanan hayati produk rekayasa genetic sebagai salah satu hasil dari bioteknologi modern.	KSDAE	Biro hukum dan jajaran KSDAE	2020 – 2021



Elang Jawa  
*Nisaetus bartelsi*

Dokumentasi:  
Yopi Suhendar

Lokasi:  
Bitung Lega, Salak I  
TN Gunung Halimun Salak